



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

2023 | **AUDITED**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap



pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 24 Mei 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si

NIP. 19660418 199203 1 009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 24 Mei 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si

NIP. 19660418 199203 1 009





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	102,51	6.088.567.250,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	102,51	6.088.567.250,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.406.600.000,00	14.779.702.850,00	102,59	6.088.567.250,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	381.800.000,00	380.510.000,00	99,66	0,00
5	BELANJA DAERAH	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	93,00	90.905.432.115,66
5.1	BELANJA OPERASI	67.439.759.153,00	62.551.550.885,00	92,75	66.906.254.351,00
5.1.01	Belanja Pegawai	19.099.748.984,00	17.204.540.669,00	90,08	15.945.059.489,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.170.452.391,00	26.735.460.521,00	94,91	50.961.194.862,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.169.557.778,00	18.611.549.695,00	92,28	0,00
5.2	BELANJA MODAL	30.968.751.785,00	28.969.316.368,00	93,54	23.999.177.764,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.209.289.785,00	7.915.346.203,00	96,42	5.911.137.940,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.378.982.000,00	19.912.001.498,00	93,14	6.400.592.144,66
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.380.480.000,00	1.141.968.667,00	82,72	11.687.447.680,00
	SURPLUS / DEFISIT	(83.620.110.938,00)	(76.360.654.403,00)	0	(84.816.864.865,66)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(83.620.110.938,00)	(76.360.654.403,00)	0	(84.816.864.865,66)





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi	351.074.000,00	196.047.000,00
Penyisihan Piutang	(1.755.370,00)	(980.235,00)
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	331.967.800,00	296.463.530,00
JUMLAH ASET LANCAR	681.286.430,00	491.530.295,00
ASET TETAP		
Tanah	35.308.468.080,00	35.217.773.080,00
Peralatan dan Mesin	51.239.206.084,00	53.500.365.403,00
Gedung dan Bangunan	98.230.658.569,66	73.362.029.908,66
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.538.570.928,00	47.681.845.046,00
Aset Tetap Lainnya	1.139.821.321,00	1.139.821.321,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.625.884.616,00	674.457.500,00
Akumulasi Penyusutan	(51.705.032.748,00)	(54.818.736.689,00)
JUMLAH ASET TETAP	185.377.576.850,66	156.757.555.569,66
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.465.633.000,00	1.465.633.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	256.600.000,00	256.600.000,00
Aset Lain-lain	26.999.426.417,00	16.625.374.045,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(76.984.999,00)	(51.324.999,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(19.820.808.954,00)	(9.702.096.473,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	8.823.865.464,00	8.594.185.573,00
JUMLAH ASET	194.882.728.744,66	165.843.271.437,66
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	107.320.166,67	56.688.000,00
Utang Belanja	315.586.049,00	252.579.130,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	422.906.215,67	309.267.130,00
JUMLAH KEWAJIBAN	422.906.215,67	309.267.130,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66
JUMLAH EKUITAS	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66
JUMLAH EKUITAS	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	194.882.728.744,66	165.843.271.437,66

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	165.534.004.307,66	128.733.908.325,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	227.951.562,00	7.063.396.350,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	76.360.654.403,00	95.869.488.945,66
EKUITAS AKHIR	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	19.951.884.491,33	6.027.313.761,67	13.924.570.729,66	231,02
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	15.265.587.918,33	6.027.313.761,67	9.238.274.156,66	153,27
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	14.934.729.850,00	5.982.863.250,00	8.951.866.600,00	149,63
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	330.858.068,33	44.450.511,67	286.407.556,66	644,33
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	4.686.296.573,00	0,00	4.686.296.573,00	0
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	4.686.296.573,00	0,00	4.686.296.573,00	0
8	BEBAN DAERAH	67.614.672.235,00	72.160.103.075,00	(4.545.430.840,00)	-6,30
8.1	BEBAN OPERASI	67.614.672.235,00	72.160.103.075,00	(4.545.430.840,00)	-6,30
8.1.01	Beban Pegawai	17.204.540.669,00	15.945.059.489,00	1.259.481.180,00	7,90
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	24.902.503.399,00	49.526.244.645,00	(24.623.741.246,00)	-49,72
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	18.611.549.695,00	0,00	18.611.549.695,00	0
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.755.370,00	980.235,00	775.135,00	79,08
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.894.323.102,00	6.687.818.706,00	206.504.396,00	3,09
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)	18.470.001.569,66	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)	18.470.001.569,66	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)	18.470.001.569,66	0

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
II. INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Profil	5
2.2 Tugas dan Fungsi	6
2.3 Struktur Organisasi	6
2.4 Visi dan Misi	13
2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	13
2.6 Rencana Strategis	14
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	16
3.1.1 Pendapatan	16
3.1.2 Belanja	17
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	27
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	29
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	39
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	41
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	43
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	

yang Ada Dalam SAP	43
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	43
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT	
DAERAH.....	45
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	45
5.1.1. Pendapatan-LRA	45
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	46
5.1.2. Belanja.....	48
5.1.2.1 Belanja Operasi	49
5.1.2.2 Belanja Modal	59
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	64
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	65
5.2.1. Aset.....	65
5.2.1.1 Aset Lancar	66
5.2.1.2 Aset Tetap	69
5.2.1.3 Aset Lainnya	76
5.2.2. Kewajiban.....	76
5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka.....	77
5.2.2.2 Utang Beban	77
5.2.3. Ekuitas	78
5.3 Penjelasan Pos Laporan Operasional	78
5.3.1. Pendapatan – LO	78
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	79
5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	80
5.3.2. Beban Operasi	80
5.3.2.1 Beban Pegawai	81
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	82
5.3.2.3 Beban Bantuan Sosial	84
5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi	84
5.3.2.5 Beban Penyisihan Piutang	84
5.3.2.6 Beban Lain-lain	84
5.3.2.7 Surplus/Defisit LO.....	85
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	85
5.4.1 Ekuitas Awal	85
5.4.2 Surplus/Defisit LO	85
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	86
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	86
VI. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	16
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan	16
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Langsung	18
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	34
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap	37
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023	45
Tabel 5.2	Riancain Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.....	46
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Tahun 2023	48
Tabel 5.4	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	49
Tabel 5.5	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023.....	50
Tabel 5.6	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	52
Tabel 5.7	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023.....	59
Tabel 5.8	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61
Tabel 5.9	Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan	63
Tabel 5.10	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	64
Tabel 5.11	Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	65
Tabel 5.12	Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	66
Tabel 5.13	Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023	67
Tabel 5.14	Persediaan Per 31 Desember 2023 Berdasarkan Unit Kerja	69
Tabel 5.15	Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	69
Tabel 5.16	Barang Ekstrakomtable Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	71
Tabel 5.17	Tanah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	71
Tabel 5.18	Mutasi Peralatan dan Mesin	72
Tabel 5.19	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	73
Tabel 5.20	Mutasi Gedung dan Bangunan.....	73
Tabel 5.21	Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan	74
Tabel 5.22	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	75
Tabel 5.23	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	76
Tabel 5.24	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	76
Tabel 5.25	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023.....	77
Tabel 5.26	Utang Beban per 31 Desember 2023	78
Tabel 5.27	Pendapatan LO Tahun 2023 dan Tahun 2022	79

Tabel 5.28 Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan Tahun 2022	79
Tabel 5.29 Beban Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022	81
Tabel 5.30 Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022	82
Tabel 5.31 Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022	83

DAFTAR GAMBAR

Grafik 2.1	Grafik PNS DKP Sulteng Berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan .	8
Grafik 2.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.....	9
Grafik 5.1	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	47
Grafik 5.2	Komposisi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2023.....	49
Grafik 5.3	Komposisi Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan tahun 2023.....	51
Grafik 5.4	Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2023	51
Grafik 5.5	Komposisi Belanja Barang	53
Grafik 5.6	Komposisi Belanja Jasa	55
Grafik 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan.....	57
Grafik 5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas	58
Grafik 5.9	Komposisi Belanja Modal Tahun 2023	60
Grafik 5.10	Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	62
Grafik 5.11	Komposisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63
Grafik 5.12	Komposisi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	64
Grafik 5.13	Komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset.....	66
Grafik 5.14	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2023	70
Grafik 5.15	Komposisi Tanah per 31 Desember 2023.....	72
Grafik 5.16	Komposisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	75
Grafik 5.17	Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023.....	80
Grafik 5.18	Komposisi Beban Operasi Tahun 2023	81

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 14 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. |
| Bab II | Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi, menjelaskan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. |
| Bab V | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Bab VI | Penutup. |

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP AkruaI pada Pemerintah Daerah

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) berawal dari terbentuknya Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat pada tahun 1956. Dinas Perikanan Laut dipimpin oleh W. Pandaleke, sedangkan Dinas Perikanan Darat dipimpin oleh A.A. CH. Baso. Pada tahun 1973, kedua dinas tersebut digabung menjadi Dinas Perikanan dengan A.A. CH. Baso sebagai kepala dinas periode 23 April 1973 – 4 Mei 1979. Berikutnya, berturut-turut menjadi Kepala Dinas Perikanan adalah Drs. B.T.H. Simanjuntak, B.Sc (1 Juli 1979 – 1 Oktober 1986), Ir. Martin W. Batubara (1 Oktober 1986 – 24 Oktober 1990); Ir. Drs. Kudrat Ikrasaputra (24 Oktober 1990 – 13 Oktober 1997); serta Ir. Faisal Shahab (13 Oktober 1997 – 3 Juli 2007).

Sejalan dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan RI, maka nomenklatur juga berubah menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001 dengan Ir. Faisal Shahab kepala dinas. Pada tanggal 21 Juli 2019, H. Moh Arif Latjuba, SE., M.Si menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini. Sejalan dengan tuntutan Perda No. 4 tahun 2008 serta PP 41 tahun 2007, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 22 tahun 2009 tertanggal 4 Mei 2009 maka terjadi perubahan organisasi dan nomenklatur menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi yang menjadi pedoman dinas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

2.2 Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
6. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan

2.3 Struktur Organisasi

DKP Sulteng dalam menjalankan perannya di bidang Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 1 sekretariat, 4 bidang dan. 10 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari Sub bagian Kepegawaian dan Umum, Sub bagian Program dan Sub bagian Keuangan dan asset; bertugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, Keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di

lingkungan Dinas.

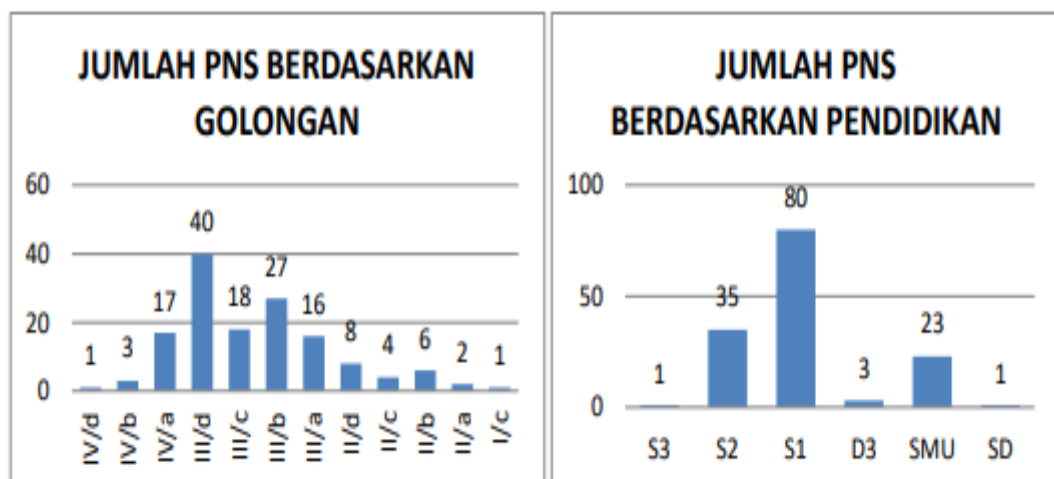
2. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri dari seksi pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, seksi pemanfaatan ruang laut dan seksi konservasi ruang laut; bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.
3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Seksi Sumberdaya Ikan; bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan
4. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP terdiri dari Seksi pengembangan usaha perikanan budidaya, Seksi logistik hasil perikanan dan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemberdayaan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya.
5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari seksi pengawasan pengelolaan ruang laut, seksi pengawasan perikanan budidaya dan P2HP dan seksi penanganan pelanggaran; bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan pengelolaan ruang laut, pengawasan perikanan budidaya & P2HP serta penanganan pelanggaran
6. UPT Balai Perbenihan Perikanan, terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi perbenihan ikan air tawar dan seksi perbenihan ikan air payau dan laut; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang perbenihan perikanan.
7. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi perekayasa pengolahan hasil perikanan dan Seksi Penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; bertugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
8. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Donggala), UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Paranggi), UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III

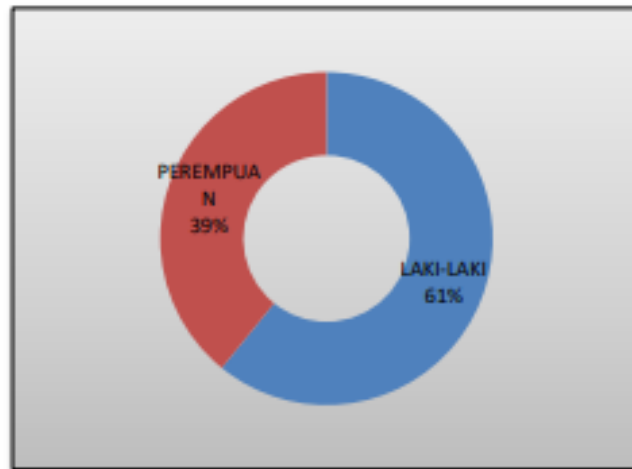
(Pagimana) dan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Morowali); terdiri dari sub bagian tata usaha, Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan dan seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pad dinas di bidang kelautan dan pelabuhan perikanan.

9. UPT Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai (Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut), UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali (Morowali dan Morowali Utara), UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Doboto (Donggala, Buol dan Toli-toli) dan UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini (Parigi Moutong, Poso dan Tojo Una-Una); terdiri dari sub bagian tata usaha, Seksi Wilayah I dan Seksi wilayah II; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada dinas di bidang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

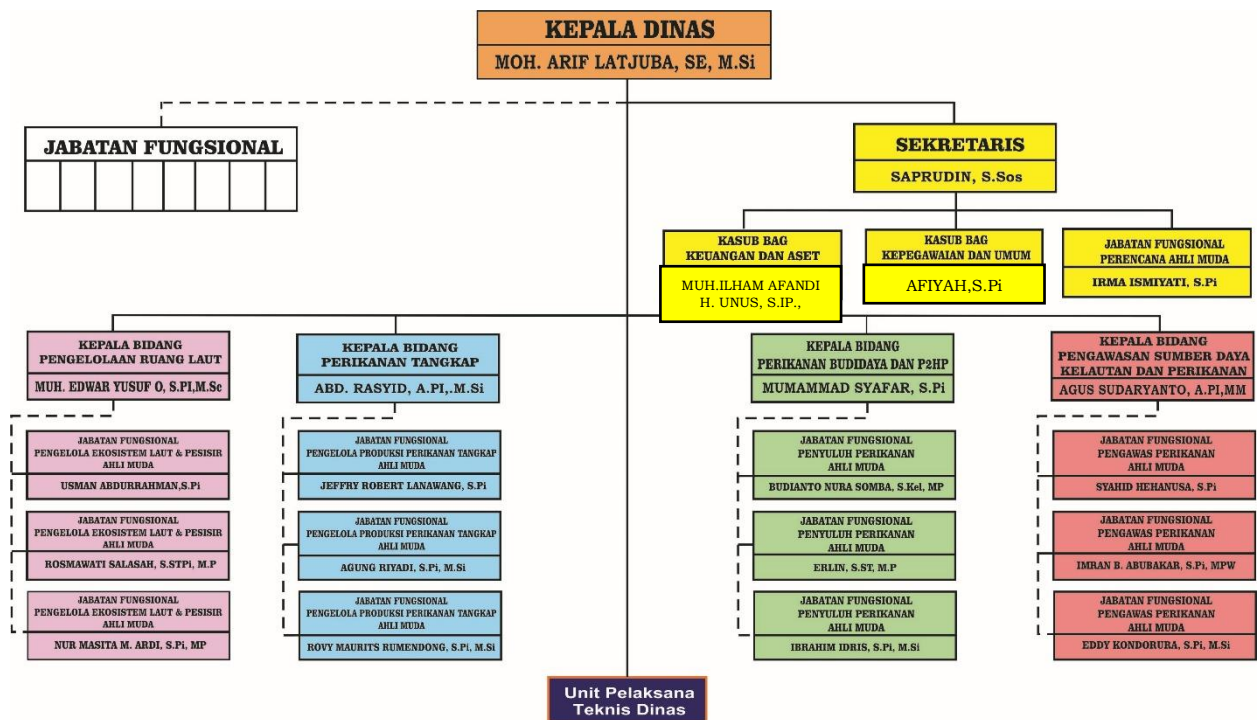
Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 143 orang personel. Berikut grafik penggolongan karyawan DKP Sulteng berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan serta struktur organisasi DKP Sulteng, sebagai berikut:

Grafik 2.1 Grafik PNS DKP Sulteng
Berdasarkan Golongan/Ruang, Pendidikan dan Gender

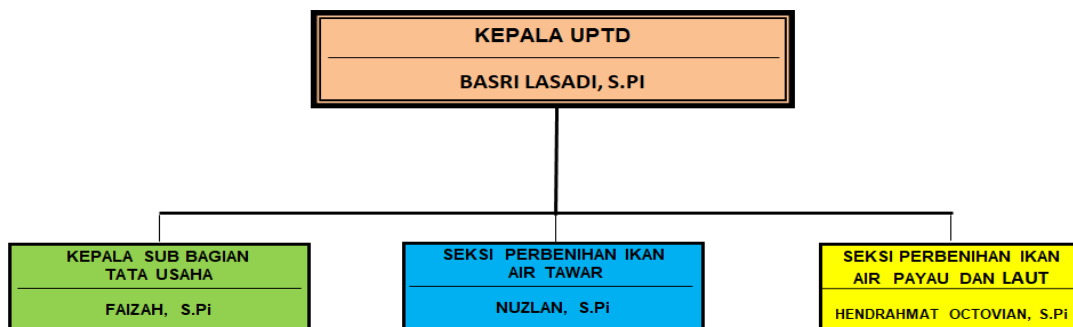




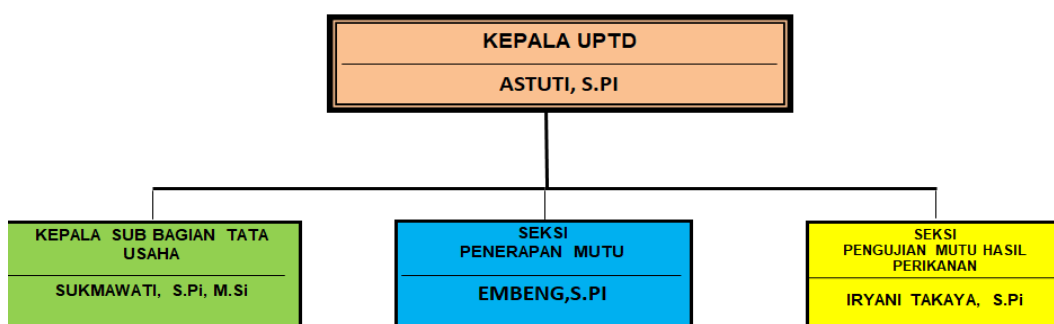
Grafik 2.2
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah



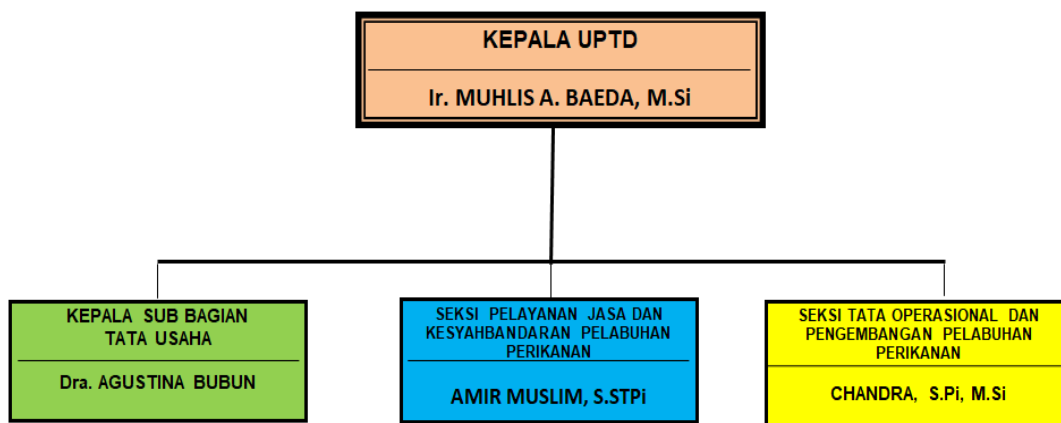
a. Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan



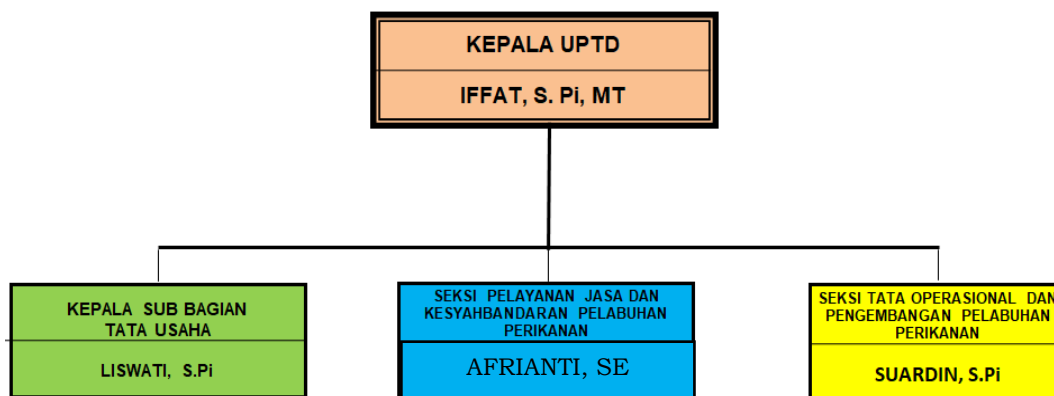
b. Struktur Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)



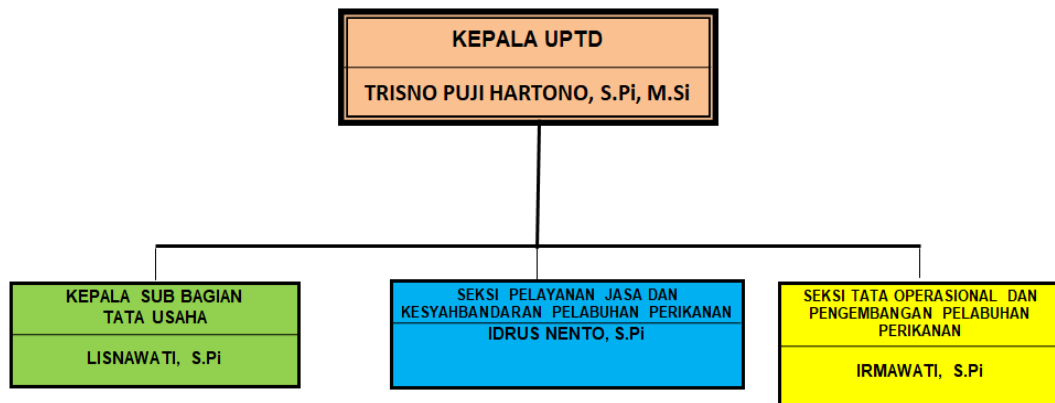
c. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I



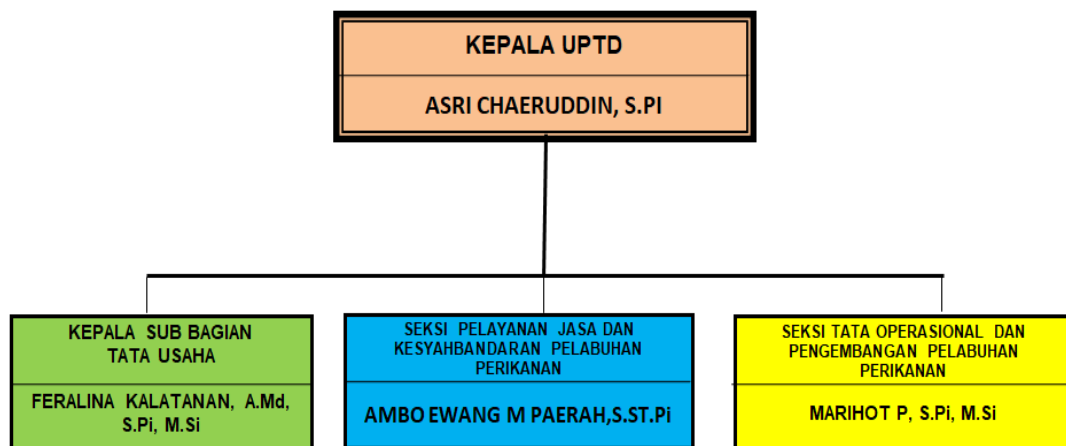
d. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II



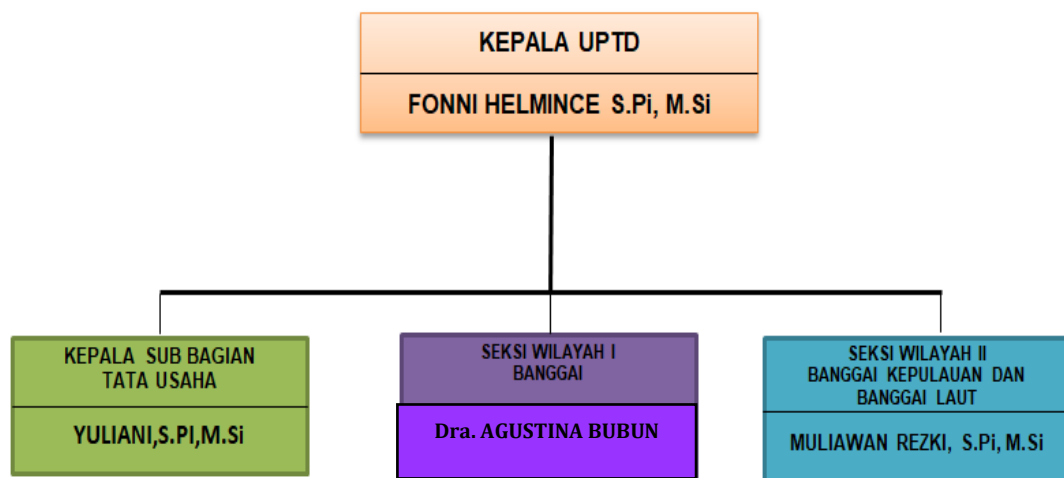
e. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III



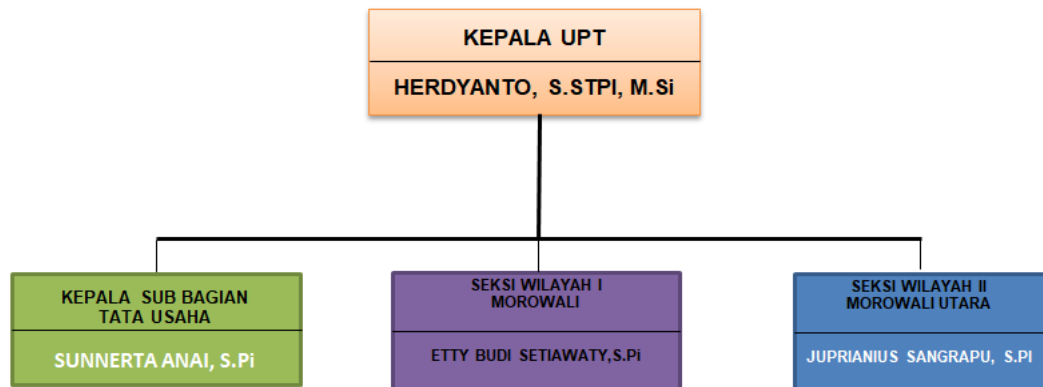
f. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV



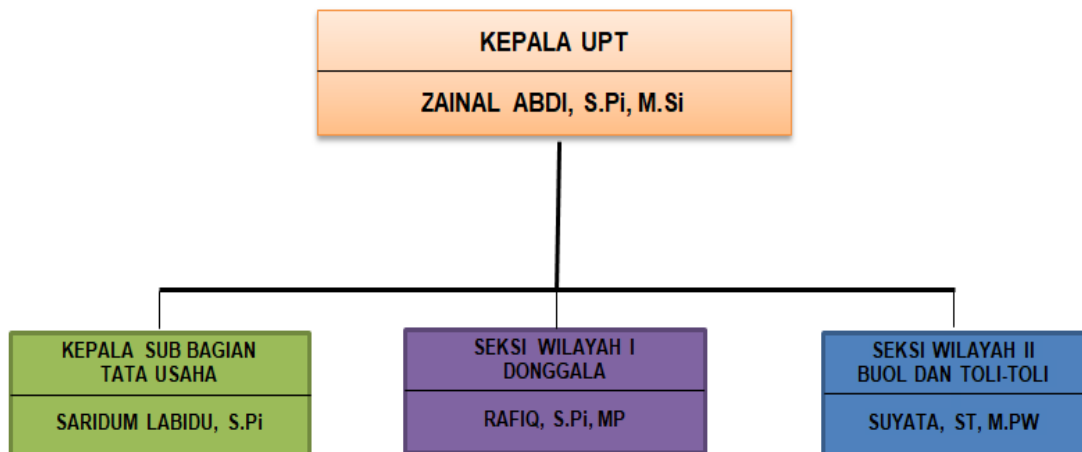
g. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai



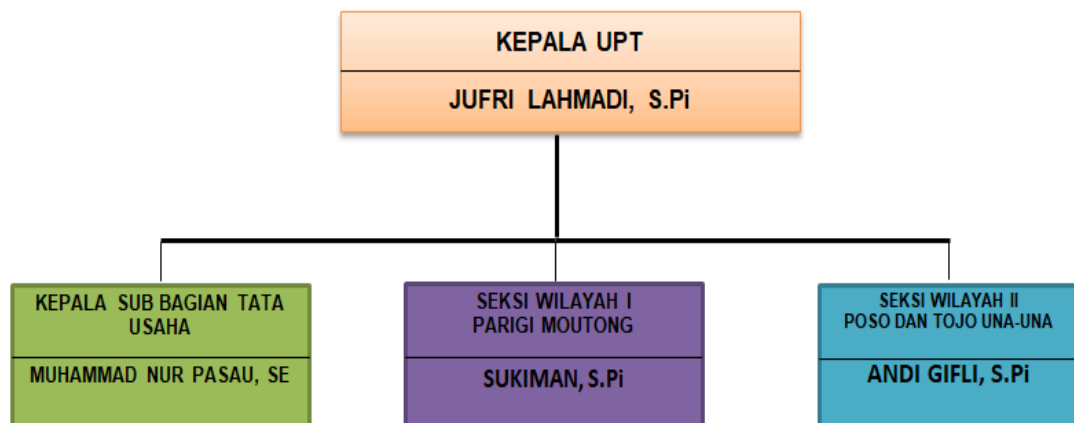
h. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali



i. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol dan Toli-toli



j. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini



2.4 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mendukung pemerintah pusat merumuskan Visi 2016-2022 :

“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2022, DKP Sulteng masuk dalam 3 (tiga) misi dari 5 (lima) misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni, Misi 1 (satu) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi

Hukum dan HAM; Misi 4 (empat) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia; dan Misi 5 (lima) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022 maka disusun Misi DKP Sulteng tahun 2016-2022, yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur;
2. Meningkatkan Infrastruktur Inovasi teknologi produksi yang maju dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing; dan
4. Meningkatkan upaya konservasi perairan

2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pencapaian jangka menengah DKP Sulteng adalah Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Adapun definisi operasional tujuan diatas adalah:

- 1) Sejahtera secara ekonomi, melalui:
 - a) Peningkatan jumlah produksi kelautan dan perikanan melalui pendekatan agribisnis;

- b) Peningkatan inovasi teknologi berkelanjutan dan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c) Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan produksi kelautan dan perikanan.
- 2) Sejahtera secara sosial, melalui:
- a) Peningkatan SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Peningkatan SDM ASN Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sejahtera secara lingkungan, melalui:
- a) Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
 - b) Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapula sasaran yang hendak dicapai yakni :

1. Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kinerja ASN bidang kelautan dan perikanan;
2. Terselenggaranya peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan;
3. Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi;
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah;
6. Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
7. Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
8. Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
9. Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran pelaku usaha;
10. Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan.

2.6 Rencana Strategis

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau suatu cara untuk mencapai visi misi yang telah dirumuskan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
 - a) Peningkatan produksi perikanan budidaya.
 - b) Peningkatan Produksi perikanan tangkap.
2. Pengembangan Agribisnis dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

- a) Peningkatan Pengolahan Hasil perikanan.
- b) Menjaga kualitas melalui keamanan pangan.
- 3. Peningkatan konservasi lingkungan demi menjaga ketahanan pangan;
 - a) Mitigasi bencana.
 - b) Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c) Pengawasan SDKP terintegrasi.
- 4. Peningkatan SDM mendukung ketahanan pangan;
 - a) Peningkatan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.
 - b) Peningkatan SDM ASN kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2022 ditetapkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) sejahtera secara ekonomi; (2) sejahtera secara lingkungan; dan (3) sejahtera secara sosial. Dengan memperhatikan ketiga dimensi diatas maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi ASN dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 2. Penyediaan inovasi teknologi dan peningkatan hasil olahan perikanan
- 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, penataan ruang dan konservasi Sumber Daya Hayati Laut (SDHL); dan
- 4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan teralaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
Pendapatan	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51
Pendapatan Asli Daerah	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51
Belanja	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	(6.887.643.685,00)	93,00
Belanja Operasi	67.439.759.153,00	62.551.550.885,00	(4.888.208.268,00)	92,75
Belanja Modal	30.968.751.785,00	28.969.316.368,00	(1.999.435.417,00)	93,54
Surplus / (Defisit)	(83.620.110.938,00)	(76.360.654.403,00)	7.259.456.535,00	91,32

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan tahun 2023 adalah Rp14.788.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.160.212.850,00 yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 102,51 persen dari total anggaran. Realisasi pendapatan pada tahun 2023 meningkat sebesar 148,99 persen dari realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp12.975.954.500,00. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
Retribusi Jasa Usaha	5.416.000.000,00	5.492.727.800,00	76.727.800,00	101,42
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.000.000,00	63.020.000,00	12.020.000,00	123,57
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.580.000.000,00	3.634.007.800,00	54.007.800,00	101,51
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.785.000.000,00	1.795.700.000,00	10.700.000,00	100,60
Retribusi Perizinan Tertentu	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	296.375.050,00	103,30
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	296.375.050,00	103,30
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	381.800.000,00	380.510.000,00	-1.290.000,00	99,66
Hasil Sewa BMD	381.800.000,00	380.510.000,00	-1.290.000,00	99,66
Jumlah Pendapatan	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2023 ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan perbaikan sistem pelayanan pada unit-unit penghasil PAD. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan lain-lain PAD yang sah lainnya. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Perizinan Tertentu berupa retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada badan. Retribusi pelayanan kepelabuhan memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah. Berikut rincian pendapatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terealisasi sebesar Rp63.020.000,00 atau 123,57 persen dari anggaran sebesar Rp51.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pengujian laboratorium.
- b. Retribusi pelayanan kepelabuhan, terealisasi sebesar Rp3.634.007.800,00 melebihi target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp54.077.800,00 dari anggaran sebesar Rp3.580.000.000,00. Realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan berupa jasa kepelabuhan yang dilakukan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. Retribusi tersebut berupa pelayanan pabrik es, pelayanan tambat labuh kapal, mess nelayan andon dan miniplant. Realisasi retribusi ini memberikan kontribusi sebesar 23,7 persen terhadap total pendapatan.
- c. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, terealisasi sebesar Rp1.795.700.000,00 atau 100,60 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.785.000.000,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan benih dan ikan/udang konsumsi.
- d. Retribusi pemberian izin usaha perikanan terealisasi sebesar Rp 9.286.975.050,00 melebihi target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp296.375.050,00 dari anggaran sebesar Rp8.990.600.000,00. atau 103,30. Realisasi retribusi ini memberikan kontribusi sebesar 61,26 persen terhadap total pendapatan.
- e. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp380.510.000,00 atau sebesar 99,66 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp381.800.000,00

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang kelautan dan perikanan, tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola anggaran belanja

operasi sebesar Rp67.439.759.153,00 dan belanja modal sebesar Rp30.968.751.785,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp98.408.510.938,00.

Realisasi untuk belanja operasi sebesar Rp62.551.550.885,00 atau 92,75 persen dari anggaran, belanja modal sebesar Rp28.969.316.368,00 atau 93,54 persen dari anggaran sehingga total realisasi belanja sebesar Rp91.520.867.253,00 atau 93,00 persen. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	-6.887.643.685,00	93,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.158.211.959,00	30.002.758.768,00	-2.155.453.191,00	93,30
<i>01.1.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>713.252.000,00</i>	<i>672.662.097,00</i>	<i>-40.589.903,00</i>	<i>94,31</i>
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	449.310.000,00	425.220.097,00	-24.089.903,00	94,64
01.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	449.310.000,00	425.220.097,00	-24.089.903,00	94,64
01.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.310.000,00	425.220.097,00	-24.089.903,00	94,64
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.942.000,00	247.442.000,00	-16.500.000,00	93,75
01.1.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	263.942.000,00	247.442.000,00	-16.500.000,00	93,75
01.1.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.942.000,00	247.442.000,00	-16.500.000,00	93,75
<i>01.1.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>20.118.783.762,00</i>	<i>18.218.998.118,00</i>	<i>-1.899.785.644,00</i>	<i>90,56</i>
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	-1.875.088.315,00	89,50
01.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	-1.875.088.315,00	89,50
01.1.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	-1.875.088.315,00	89,50
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.810.284.097,00	1.786.256.779,00	-24.027.318,00	98,67
01.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.761.580.651,00	1.737.790.801,00	-23.789.850,00	98,65
01.1.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.112.290.000,00	1.092.170.000,00	-20.120.000,00	98,19
01.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.290.651,00	645.620.801,00	-3.669.850,00	99,43
01.1.02.02.5.2	BELANJA MODAL	48.703.446,00	48.465.978,00	-237.468,00	99,51
01.1.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.703.446,00	48.465.978,00	-237.468,00	99,51
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.364.000,00	195.061.989,00	-302.011,00	99,85
01.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	195.364.000,00	195.061.989,00	-302.011,00	99,85
01.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.364.000,00	195.061.989,00	-302.011,00	99,85
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103.024.000,00	102.766.000,00	-258.000,00	99,75

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.1.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.024.000,00	102.766.000,00	-258.000,00	99,75
01.1.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.024.000,00	102.766.000,00	-258.000,00	99,75
01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	157.902.681,00	157.792.681,00	-110.000,00	99,93
01.1.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	157.902.681,00	157.792.681,00	-110.000,00	99,93
01.1.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.902.681,00	157.792.681,00	-110.000,00	99,93
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.260.000,00	41.870.000,00	-390.000,00	99,08
01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.260.000,00	41.870.000,00	-390.000,00	99,08
01.1.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.260.000,00	41.870.000,00	-390.000,00	99,08
01.1.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.260.000,00	41.870.000,00	-390.000,00	99,08
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.290.790,00	176.545.415,00	-4.745.375,00	97,38
01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.084.190,00	49.206.715,00	-877.475,00	98,25
01.1.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.582.389,00	38.704.914,00	-877.475,00	97,78
01.1.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.582.389,00	38.704.914,00	-877.475,00	97,78
01.1.05.03.5.2	BELANJA MODAL	10.501.801,00	10.501.801,00	0	100,00
01.1.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.501.801,00	10.501.801,00	0	100,00
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.563.600,00	24.789.700,00	-773.900,00	96,97
01.1.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.563.600,00	24.789.700,00	-773.900,00	96,97
01.1.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.563.600,00	24.789.700,00	-773.900,00	96,97
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105.643.000,00	102.549.000,00	-3.094.000,00	97,07
01.1.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	105.643.000,00	102.549.000,00	-3.094.000,00	97,07
01.1.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.643.000,00	102.549.000,00	-3.094.000,00	97,07
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.358.996.796,00	2.289.852.236,00	-69.144.560,00	97,07
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.907.287,00	14.907.169,00	-118	100,00
01.1.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.907.287,00	14.907.169,00	-118	100,00
01.1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.907.287,00	14.907.169,00	-118	100,00
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.756.328.892,00	1.710.905.517,00	-45.423.375,00	97,41
01.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	574.658.497,00	564.476.068,00	-10.182.429,00	98,23
01.1.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	38.280.000,00	38.280.000,00	0	100,00
01.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.378.497,00	526.196.068,00	-10.182.429,00	98,10
01.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.181.670.395,00	1.146.429.449,00	-35.240.946,00	97,02
01.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.181.670.395,00	1.146.429.449,00	-35.240.946,00	97,02
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.998.978,00	19.947.300,00	-51.678,00	99,74
01.1.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.998.978,00	9.997.300,00	-1.678,00	99,98
01.1.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.978,00	9.997.300,00	-1.678,00	99,98

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.1.06.03.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.950.000,00	-50.000,00	99,50
01.1.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.950.000,00	-50.000,00	99,50
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	165.075.639,00	158.283.730,00	-6.791.909,00	95,89
01.1.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	153.168.205,00	146.768.730,00	-6.399.475,00	95,82
01.1.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.168.205,00	146.768.730,00	-6.399.475,00	95,82
01.1.06.05.5.2	BELANJA MODAL	11.907.434,00	11.515.000,00	-392.434,00	96,70
01.1.06.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.907.434,00	11.515.000,00	-392.434,00	96,70
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.686.000,00	385.808.520,00	-16.877.480,00	95,81
01.1.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	402.686.000,00	385.808.520,00	-16.877.480,00	95,81
01.1.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.686.000,00	385.808.520,00	-16.877.480,00	95,81
01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>7.121.340.497,00</i>	<i>7.042.986.129,00</i>	<i>-78.354.368,00</i>	<i>98,90</i>
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.200.000,00	35.150.000,00	-50.000,00	99,86
01.1.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.200.000,00	35.150.000,00	-50.000,00	99,86
01.1.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	35.150.000,00	-50.000,00	99,86
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.925.234.956,00	3.893.351.979,00	-31.882.977,00	99,19
01.1.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.925.234.956,00	3.893.351.979,00	-31.882.977,00	99,19
01.1.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0	100,00
01.1.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.907.834.956,00	3.875.951.979,00	-31.882.977,00	99,18
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.716.716,00	40.857.152,00	-859.564,00	97,94
01.1.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.259.126,00	37.257.152,00	-1.974,00	99,99
01.1.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.259.126,00	37.257.152,00	-1.974,00	99,99
01.1.08.03.5.2	BELANJA MODAL	4.457.590,00	3.600.000,00	-857.590,00	80,76
01.1.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.457.590,00	3.600.000,00	-857.590,00	80,76
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.119.188.825,00	3.073.626.998,00	-45.561.827,00	98,54
01.1.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.081.188.825,00	3.038.176.998,00	-43.011.827,00	98,60
01.1.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	31.020.000,00	31.020.000,00	0	100,00
01.1.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.168.825,00	3.007.156.998,00	-43.011.827,00	98,59
01.1.08.04.5.2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	35.450.000,00	-2.550.000,00	93,29
01.1.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	35.450.000,00	-2.550.000,00	93,29
01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.622.288.114,00</i>	<i>1.559.844.773,00</i>	<i>-62.443.341,00</i>	<i>96,15</i>
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	736.148.310,00	691.274.513,00	-44.873.797,00	93,90
01.1.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	736.148.310,00	691.274.513,00	-44.873.797,00	93,90
01.1.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.148.310,00	691.274.513,00	-44.873.797,00	93,90
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	738.779.804,00	721.999.260,00	-16.780.544,00	97,73

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	Mesin Lainnya				
01.1.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	720.935.137,00	704.406.260,00	-16.528.877,00	97,71
01.1.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.935.137,00	704.406.260,00	-16.528.877,00	97,71
01.1.09.06.5.2	BELANJA MODAL	17.844.667,00	17.593.000,00	-251.667,00	98,59
01.1.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.844.667,00	17.593.000,00	-251.667,00	98,59
01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	117.360.000,00	116.576.000,00	-784.000,00	99,33
01.1.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	117.360.000,00	116.576.000,00	-784.000,00	99,33
01.1.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.360.000,00	116.576.000,00	-784.000,00	99,33
01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.995.000,00	-5.000,00	99,98
01.1.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.995.000,00	-5.000,00	99,98
01.1.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.995.000,00	-5.000,00	99,98
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.151.465.999,00	4.615.299.345,00	-1.536.166.654,00	75,03
02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.332.266.600,00	3.824.668.794,00	-1.507.597.806,00	71,73
02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50.264.000,00	49.727.217,00	-536.783,00	98,93
02.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.264.000,00	49.727.217,00	-536.783,00	98,93
02.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.264.000,00	49.727.217,00	-536.783,00	98,93
02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4.256.954.600,00	3.141.413.434,00	-1.115.541.166,00	73,79
02.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.148.821.766,00	1.041.799.434,00	-107.022.332,00	90,68
02.1.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.350.000,00	6.350.000,00	0	100,00
02.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.471.766,00	1.035.449.434,00	-107.022.332,00	90,63
02.1.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.108.132.834,00	2.099.614.000,00	-1.008.518.834,00	67,55
02.1.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.128.132.834,00	2.099.614.000,00	-28.518.834,00	98,66
02.1.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	980.000.000,00	0	-980.000.000,00	-
02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	960.650.000,00	569.730.143,00	-390.919.857,00	59,31
02.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	960.650.000,00	569.730.143,00	-390.919.857,00	59,31
02.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.650.000,00	569.730.143,00	-390.919.857,00	59,31
02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	64.398.000,00	63.798.000,00	-600.000,00	99,07
02.1.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.398.000,00	63.798.000,00	-600.000,00	99,07
02.1.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.398.000,00	63.798.000,00	-600.000,00	99,07
02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	189.649.000,00	188.274.972,00	-1.374.028,00	99,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	95.400.000,00	94.440.000,00	-960.000,00	98,99
02.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.400.000,00	94.440.000,00	-960.000,00	98,99
02.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	94.440.000,00	-960.000,00	98,99
02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	19.436.000,00	19.340.831,00	-95.169,00	99,51
02.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.436.000,00	19.340.831,00	-95.169,00	99,51
02.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.436.000,00	19.340.831,00	-95.169,00	99,51
02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	74.813.000,00	74.494.141,00	-318.859,00	99,57
02.1.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	74.813.000,00	74.494.141,00	-318.859,00	99,57
02.1.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.813.000,00	74.494.141,00	-318.859,00	99,57
02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	629.550.399,00	602.355.579,00	-27.194.820,00	95,68
02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	185.365.000,00	177.569.317,00	-7.795.683,00	95,79
02.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	185.365.000,00	177.569.317,00	-7.795.683,00	95,79
02.1.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.950.000,00	8.950.000,00	0	100,00
02.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.415.000,00	168.619.317,00	-7.795.683,00	95,58
02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	209.368.000,00	197.658.922,00	-11.709.078,00	94,41
02.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	209.368.000,00	197.658.922,00	-11.709.078,00	94,41
02.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.368.000,00	197.658.922,00	-11.709.078,00	94,41
02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	229.817.399,00	222.127.340,00	-7.690.059,00	96,65
02.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	224.991.899,00	218.501.840,00	-6.490.059,00	97,12
02.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.991.899,00	218.501.840,00	-6.490.059,00	97,12
02.1.03.03.5.2	BELANJA MODAL	4.825.500,00	3.625.500,00	-1.200.000,00	75,13
02.1.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.825.500,00	3.625.500,00	-1.200.000,00	75,13
02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
02.1.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
02.1.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39.736.180.539,00	37.484.514.215,00	-2.251.666.324,00	94,33

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.1.01	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	19.355.148.651,00	17.765.605.795,00	-1.589.542.856,00	91,79
03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	853.551.800,00	729.646.150,00	-123.905.650,00	85,48
03.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	853.551.800,00	729.646.150,00	-123.905.650,00	85,48
03.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.087.400,00	692.489.800,00	-78.597.600,00	89,81
03.1.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	82.464.400,00	37.156.350,00	-45.308.050,00	45,06
03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	997.389.676,00	932.215.275,00	-65.174.401,00	93,47
03.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	877.921.789,00	816.860.275,00	-61.061.514,00	93,04
03.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.921.789,00	816.860.275,00	-61.061.514,00	93,04
03.1.01.02.5.2	BELANJA MODAL	119.467.887,00	115.355.000,00	-4.112.887,00	96,56
03.1.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.467.887,00	115.355.000,00	-4.112.887,00	96,56
03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	17.504.207.175,00	16.103.744.370,00	-1.400.462.805,00	92,00
03.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.504.207.175,00	16.103.744.370,00	-1.400.462.805,00	92,00
03.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.048.250,00	491.546.370,00	-68.501.880,00	87,77
03.1.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.944.158.925,00	15.612.198.000,00	-1.331.960.925,00	92,14
03.1.03	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	526.113.600,00	421.054.699,00	-105.058.901,00	80,03
03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	526.113.600,00	421.054.699,00	-105.058.901,00	80,03
03.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	526.113.600,00	421.054.699,00	-105.058.901,00	80,03
03.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.113.600,00	421.054.699,00	-105.058.901,00	80,03
03.1.06	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	19.854.918.288,00	19.297.853.721,00	-557.064.567,00	97,19
03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	19.589.025.824,00	19.038.857.271,00	-550.168.553,00	97,19
03.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.709.853.131,00	2.550.307.918,00	-159.545.213,00	94,11
03.1.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	0	100,00
03.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.696.253.131,00	2.536.707.918,00	-159.545.213,00	94,08
03.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	16.879.172.693,00	16.488.549.353,00	-390.623.340,00	97,69
03.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.190.693,00	197.715.000,00	-2.475.693,00	98,76
03.1.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.678.982.000,00	16.290.834.353,00	-388.147.647,00	97,67
03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	265.892.464,00	258.996.450,00	-6.896.014,00	97,41
03.1.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	176.891.411,00	174.396.450,00	-2.494.961,00	98,59
03.1.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.891.411,00	174.396.450,00	-2.494.961,00	98,59
03.1.06.03.5.2	BELANJA MODAL	89.001.053,00	84.600.000,00	-4.401.053,00	95,06
03.1.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	89.001.053,00	84.600.000,00	-4.401.053,00	95,06

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	Mesin				
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.883.057.928,00	10.223.352.683,00	-659.705.245,00	93,94
04.1.05	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>1.362.003.056,00</i>	<i>1.323.207.629,00</i>	<i>-38.795.427,00</i>	<i>97,15</i>
04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	658.388.000,00	630.514.344,00	-27.873.656,00	95,77
04.1.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	658.388.000,00	630.514.344,00	-27.873.656,00	95,77
04.1.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0	100,00
04.1.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.438.000,00	616.564.344,00	-27.873.656,00	95,67
04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	703.615.056,00	692.693.285,00	-10.921.771,00	98,45
04.1.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	703.615.056,00	692.693.285,00	-10.921.771,00	98,45
04.1.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.531.875,00	86.999.875,00	-5.532.000,00	94,02
04.1.05.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	611.083.181,00	605.693.410,00	-5.389.771,00	99,12
04.1.06	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	<i>9.521.054.872,00</i>	<i>8.900.145.054,00</i>	<i>-620.909.818,00</i>	<i>93,48</i>
04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.799.095.122,00	3.547.734.092,00	-251.361.030,00	93,38
04.1.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.663.068.522,00	2.419.399.092,00	-243.669.430,00	90,85
04.1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.698.825,00	819.033.157,00	-72.665.668,00	91,85
04.1.06.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.771.369.697,00	1.600.365.935,00	-171.003.762,00	90,35
04.1.06.01.5.2	BELANJA MODAL	1.136.026.600,00	1.128.335.000,00	-7.691.600,00	99,32
04.1.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.026.600,00	135.600.000,00	-426.600,00	99,69
04.1.06.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	992.735.000,00	-7.265.000,00	99,27
04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.721.959.750,00	5.352.410.962,00	-369.548.788,00	93,54
04.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.819.098.800,00	1.777.246.400,00	-41.852.400,00	97,70
04.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.098.800,00	1.777.246.400,00	-41.852.400,00	97,70
04.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	3.902.860.950,00	3.575.164.562,00	-327.696.388,00	91,60
04.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.380.950,00	2.350.000,00	-30.950,00	98,70
04.1.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.720.000.000,00	2.628.432.145,00	-91.567.855,00	96,63
04.1.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.180.480.000,00	944.382.417,00	-236.097.583,00	80,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.123.330.350,00	4.915.851.599,00	-207.478.751,00	95,95
05.1.01	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	<i>4.950.210.350,00</i>	<i>4.742.836.599,00</i>	<i>-207.373.751,00</i>	<i>95,81</i>
05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3.193.114.650,00	2.995.996.101,00	-197.118.549,00	93,83
05.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	793.114.650,00	780.864.561,00	-12.250.089,00	98,46
05.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.114.650,00	780.864.561,00	-12.250.089,00	98,46
05.1.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	-184.868.460,00	92,30
05.1.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	-184.868.460,00	92,30
05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	542.738.000,00	540.467.248,00	-2.270.752,00	99,58
05.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	542.738.000,00	540.467.248,00	-2.270.752,00	99,58
05.1.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0	100,00
05.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.038.000,00	534.767.248,00	-2.270.752,00	99,58
05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	273.520.000,00	266.880.000,00	-6.640.000,00	97,57
05.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	273.520.000,00	266.880.000,00	-6.640.000,00	97,57
05.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.520.000,00	266.880.000,00	-6.640.000,00	97,57
05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	940.837.700,00	939.493.250,00	-1.344.450,00	99,86
05.1.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	940.837.700,00	939.493.250,00	-1.344.450,00	99,86
05.1.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.837.700,00	939.493.250,00	-1.344.450,00	99,86
05.1.02	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>173.120.000,00</i>	<i>173.015.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>99,94</i>
05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	55.280.000,00	55.255.000,00	-25.000,00	99,95
05.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.280.000,00	55.255.000,00	-25.000,00	99,95
05.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.280.000,00	55.255.000,00	-25.000,00	99,95
05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan	74.760.000,00	74.700.000,00	-60.000,00	99,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	Kewenangannya				
05.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.760.000,00	74.700.000,00	-60.000,00	99,92
05.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.760.000,00	74.700.000,00	-60.000,00	99,92
05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	43.080.000,00	43.060.000,00	-20.000,00	99,95
05.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.080.000,00	43.060.000,00	-20.000,00	99,95
05.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	43.060.000,00	-20.000,00	99,95
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.356.264.163,00	4.279.090.643,00	-77.173.520,00	98,23
06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	108.995.600,00	108.552.975,00	-442.625,00	99,59
06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	49.982.000,00	49.932.000,00	-50.000,00	99,90
06.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.982.000,00	49.932.000,00	-50.000,00	99,90
06.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.982.000,00	49.932.000,00	-50.000,00	99,90
06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	59.013.600,00	58.620.975,00	-392.625,00	99,33
06.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.013.600,00	58.620.975,00	-392.625,00	99,33
06.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.013.600,00	58.620.975,00	-392.625,00	99,33
06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.056.648.713,00	1.036.916.111,00	-19.732.602,00	98,13
06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	226.496.030,00	225.349.500,00	-1.146.530,00	99,49
06.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	226.496.030,00	225.349.500,00	-1.146.530,00	99,49
06.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.496.030,00	225.349.500,00	-1.146.530,00	99,49
06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	830.152.683,00	811.566.611,00	-18.586.072,00	97,76

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	823.973.748,00	805.387.676,00	-18.586.072,00	97,74
06.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.264.773,00	612.881.676,00	-17.383.097,00	97,24
06.1.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	193.708.975,00	192.506.000,00	-1.202.975,00	99,38
06.1.02.02.5.2	BELANJA MODAL	6.178.935,00	6.178.935,00	0	100,00
06.1.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.178.935,00	6.178.935,00	0	100,00
06.1.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	3.190.619.850,00	3.133.621.557,00	-56.998.293,00	98,21
06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	34.336.000,00	34.330.000,00	-6.000,00	99,98
06.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.336.000,00	34.330.000,00	-6.000,00	99,98
06.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.336.000,00	34.330.000,00	-6.000,00	99,98
06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.075.766.850,00	3.022.837.557,00	-52.929.293,00	98,28
06.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.075.766.850,00	1.053.580.307,00	-22.186.543,00	97,94
06.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.994.250,00	489.950.307,00	-19.043.943,00	96,26
06.1.03.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	566.772.600,00	563.630.000,00	-3.142.600,00	99,45
06.1.03.02.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.969.257.250,00	-30.742.750,00	98,46
06.1.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	-28.329.000,00	98,43
06.1.03.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.586.250,00	-2.413.750,00	98,79
06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80.517.000,00	76.454.000,00	-4.063.000,00	94,95
06.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.517.000,00	76.454.000,00	-4.063.000,00	94,95
06.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.517.000,00	76.454.000,00	-4.063.000,00	94,95

3.2 Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan

Pelaksanaan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia baik aparaturnya maupun pelaku usaha perikanan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pulau-pulau kecil.
4. Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas.
5. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah.
6. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal.
7. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
8. Belum optimalnya sistem pendataan dan akses informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
9. Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas.
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain.
11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.
12. Belum optimalnya pemanfaatan pasar produk perikanan di dalam dan luar negeri.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh Perangkat Daerah dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
- c. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi.
 2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan Perangkat Daerah, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi aset tetap dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp.10.000.000, 00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00 Rp. 50.000, 00 Rp. 300.000, 00 Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjatan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
 1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - c. Pendapatan—LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - d. Pendapatan—LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
 - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
 - f. Beban diakui pada :
 1. Saat timbulnya kewajiban;
 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - g. Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Penjelasan Atas Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan – LRA	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	15.160.212.850,00	6.088.567.250,00

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan tahun 2023 adalah Rp14.788.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.160.212.850,00 yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 102,51 persen dari total anggaran. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Retribusi	14.406.600.000,00	14.779.702.850,00	102,59	6.088.567.250,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	381.800.000,00	380.510.000,00	-	0,00
Jumlah	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	102,51	6.088.567.250,00

Realisasi pendapatan tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi pendapatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp 9.071.645.600,00 atau 148,99 persen dari total realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp15.160.212.850,00.

Realisasi pendapatan tahun 2023 salah satunya dari Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp14.779.702.850,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.406.600.000,00. Realisasi tersebut melebihi target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp371.812.850,00 atau sebesar 102,51persen.

Lain-lain PAD yang sah di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp380.510.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp381.800.000,00. Realisasi Lain-lain PAD yang sah mencapai 99,66% dari yang dianggarkan.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
15.160.212.850,00	6.088.567.250,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan asli daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi produksi usaha daerah, retribusi izin perikanan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan rincian pendapatan asli daerah tahun 2023.

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.000.000,00	63.020.000,00	62.730.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.580.000.000,00	3.634.007.800,00	3.429.990.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.785.000.000,00	1.795.700.000,00	1.476.145.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	1.026.920.250,00
Hasil Sewa BMD	381.800.000,00	380.510.000,00	92.782.000,00
Jumlah	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	6.088.567.250,00

Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi sebesar Rp63.020.000,00 atau 123,57 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp290.000,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp62.730.000,00 atau naik sebesar 0,46 persen. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah memberikan kontribusi sebesar 0,42 persen terhadap realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp3.634.007.800,00 atau 101,51 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.580.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp204.017.800,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3.429.990.000,00 atau naik sebesar 5,95 persen. Retribusi pelayanan

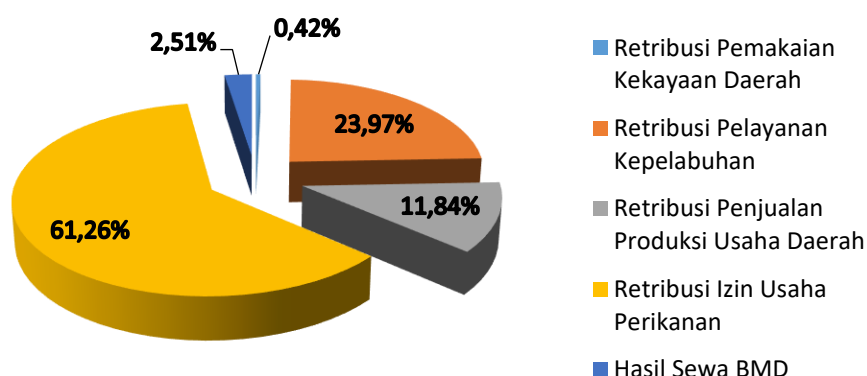
kepelabuhan memberikan kontribusi sebesar 23,97 persen terhadap realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas penjualan benih ikan/udang konsumsi. Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebesar Rp1.795.700.000,00 atau 100,60 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.785.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp319.555.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.476.145.000,00 atau naik sebesar 21,65 persen.

Realisasi retribusi izin usaha perikanan pada tahun 2023 sebesar Rp9.286.975.050,00 atau meningkat sebesar 804,35 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.286.975.050,00. Realisasi retribusi izin perikanan pada tahun 2023 mencapai target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.990.600.000,00 atau terealisasi sebesar 103,30 persen dari anggaran.

Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp380.510.000,00 atau mencapai 99,66 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp381.800.000,00. Realisasi Sewa BMD Tahun 2023 meningkat sebesar Rp287.728.000,00 atau 310,11 persen dari tahun 2022 sebesar Rp92.782.000,00. Berikut disajikan grafik yang menunjukkan kontribusi masing-masing jenis pendapatan asli daerah terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

Grafik 5.1
Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023



Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
91.520.867.253,00	90.905.432.115,66

5.1.2 Belanja

Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp91.520.867.253,00 atau 93,00 persen dari anggaran belanja Rp98.408.510.938,00. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp615.435.137,34 atau 0,68 persen dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp90.905.432.115,66. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

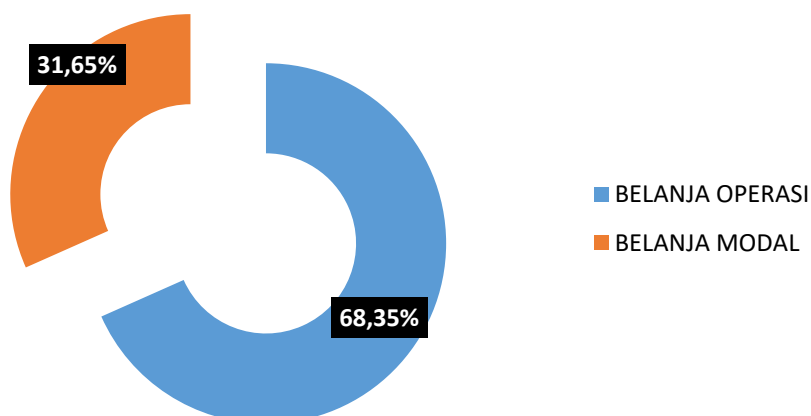
Tabel 5.3
Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	67.439.759.153,00	62.551.550.885,00	92,75	66.906.254.351,00
Belanja Modal	30.968.751.785,00	28.969.316.368,00	93,54	23.999.177.764,66
Jumlah	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	93,00	90.905.432.115,66

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja tahun 2023 terdiri atas realisasi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp62.551.550.885,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.439.759.153,00 atau terealisasi sebesar 92,75 persen. Realisasi belanja operasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.354.703.466,00 atau sebesar 6,51 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp66.906.254.351,00.

Belanja modal terealisasi sebesar Rp28.969.316.368,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.968.751.785,00 atau terealisasi sebesar 93,54 persen. Realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.970.138.603,34 atau sebesar 20,71 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.999.177.764,66. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa 68,35 persen belanja ditujukan untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan dan 31,65 persen digunakan sebagai investasi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Berikut disajikan grafik kontribusi realisasi belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2023.

Grafik 5.2
Kontribusi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2023



Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
62.551.550.885,00	66.906.254.351,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa . Belanja operasi terealisasi sebesar Rp62.551.550.885,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.439.759.153,00 atau terealisasi sebesar 92,75 persen. Berikut disajikan rekapitulasi belanja operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	19.099.748.984,00	17.204.540.669,00	15.945.059.489,00
Belanja Barang dan Jasa	28.170.452.391,00	26.735.460.521,00	50.961.194.862,00
Belanja Bantuan Sosial	20.169.557.778,00	18.611.549.695,00	0,00
Jumlah	67.439.759.153,00	62.551.550.885,00	66.906.254.351,00

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
17.204.540.669,00	15.945.059.489,00

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 mencapai 89,62 persen dari anggaran sebesar Rp17.204.540.669,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp15.945.059.489,00, realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp17.204.540.669,00 mengalami kenaikan sebesar 7,90 persen atau sebesar Rp1.259.481.180,00. Berikut

disajikan rincian komponen belanja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

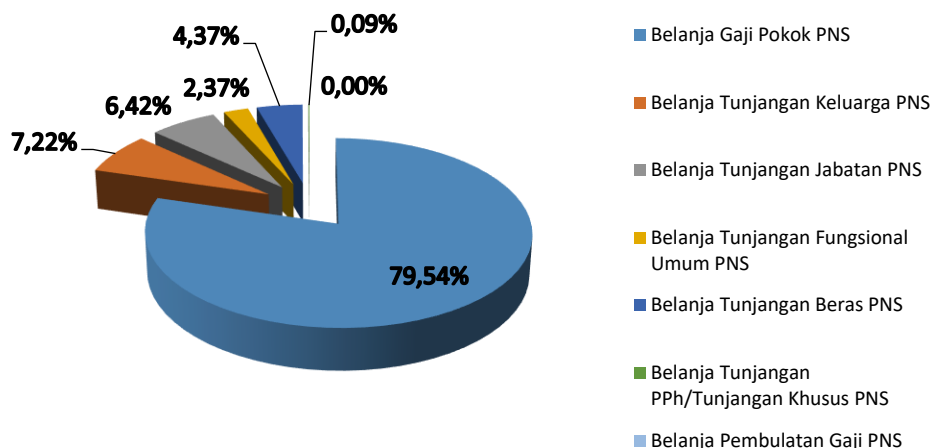
Tabel 5.5
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.255.737.162,00	9.504.846.236,00	9.134.167.481,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.045.478.142,00	6.040.076.433,00	5.881.942.758,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.798.533.680,00	1.659.618.000,00	928.949.250,00
Jumlah	19.099.748.984,00	17.204.540.669,00	15.945.059.489,00

Komponen belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2023 sebesar Rp9.504.846.236,00 mengalami kenaikan sebesar 4,06 persen atau sebesar Rp370.678.755,00 dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp9.134.167.481,00. Belanja gaji dan tunjangan tahun 2023 terealisasi sebesar 84,44 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.255.737.162,00 sehingga terdapat anggaran yang tersisa sebesar Rp1.750.890.926,00.

Belanja gaji dan tunjangan terdiri atas belanja gaji pokok PNS/uang representasi, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan fungsional, belanja tunjangan fungsional umum, belanja tunjangan beras, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus dan belanja pembulatan gaji. Belanja gaji pokok PNS/Uang representasi memberikan kontribusi sebesar 79,54 persen terhadap belanja gaji dan tunjangan atau lebih besar dibandingkan belanja lainnya dalam kelompok belanja gaji dan tunjangan. Berikut disajikan komposisi realisasi kelompok belanja gaji dan tunjangan.

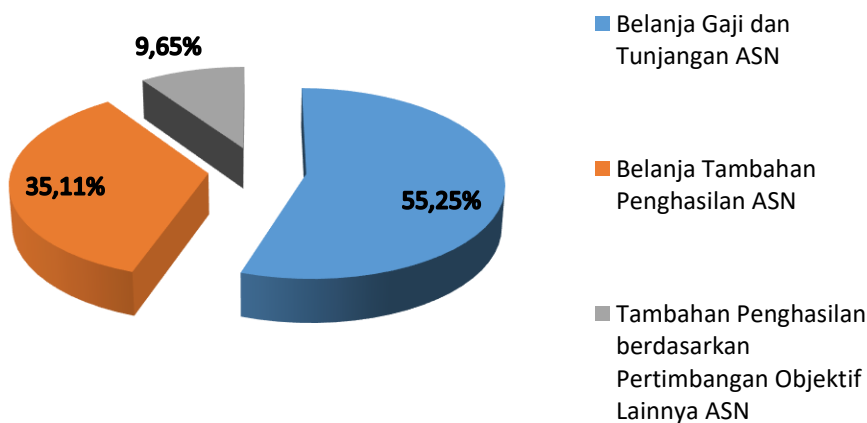
Grafik 5.3
Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023



Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 sebesar Rp6.040.076.433,00 mengalami kenaikan 2,69 persen atau sebesar Rp158.133.675,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.881.942.758,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN mencapai 99,91 persen dari anggaran sebesar Rp6.045.478.142,00. Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS memberikan kontribusi sebesar 35,11 persen terhadap realiasi belanja pegawai tahun 2023.

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023 mencapai 92,28 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp1.798.533.680,00. Realisasi tersebut meningkat 78,66 persen dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp928.949.250,00. Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 9,65 persen terhadap realisasi belanja pegawai tahun 2023.

Grafik 5.4
Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	26.735.460.521,00	50.961.194.862,00

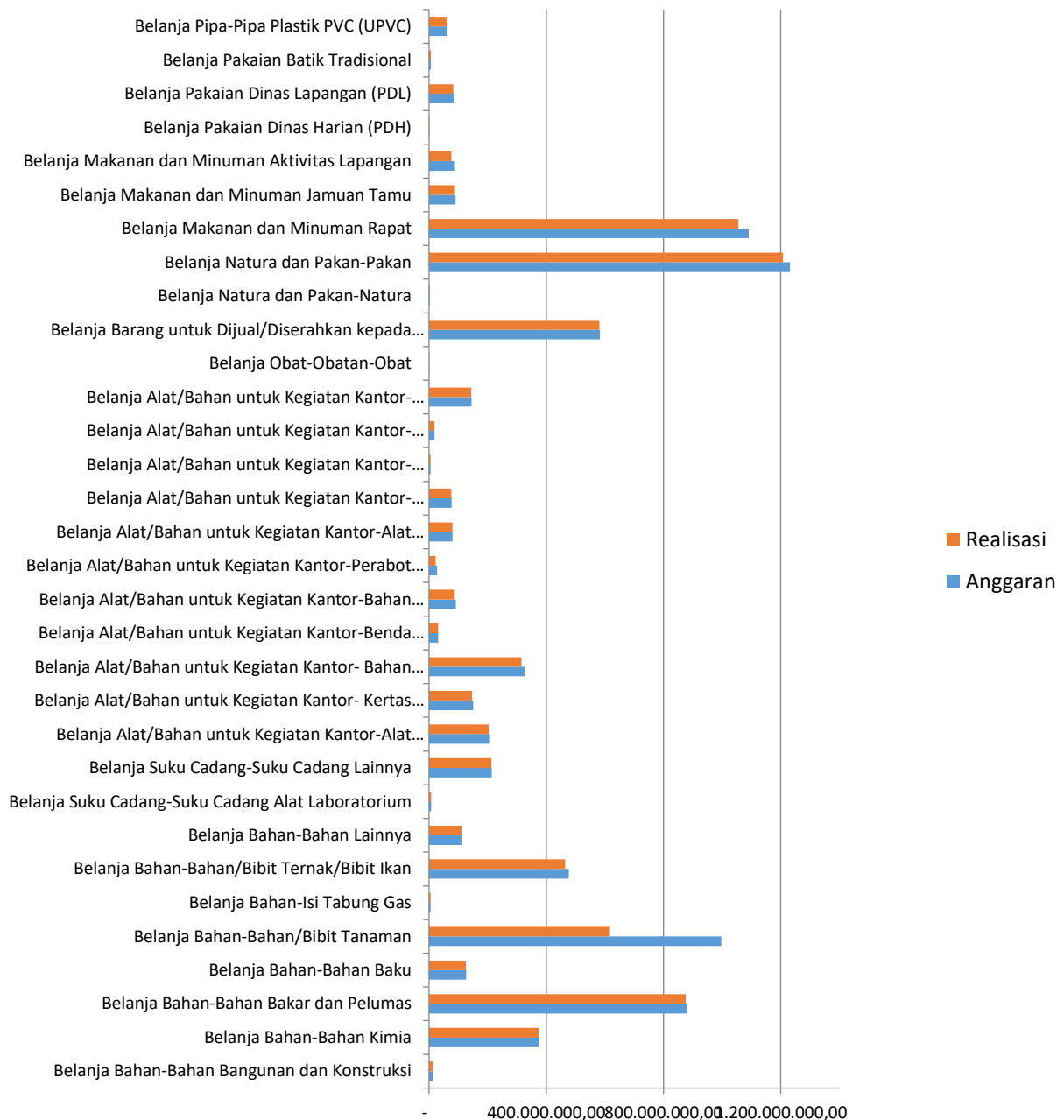
Belanja barang dan jasa tahun 2023 terealisasi mencapai 94,91 persen dari anggaran sebesar Rp28.170.452.391,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 menurun sebesar Rp24.225.734.341,00 atau sebesar 47,54 persen dari realisasi tahun 2022. Berikut disajikan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
Belanja Barang	7.608.895.291,00	7.100.427.075,00	93,32
Belanja Jasa	12.895.988.372,00	12.450.901.523,00	96,55
Belanja Pemeliharaan	1.590.279.128,00	1.567.864.925,00	98,59
Belana Perjalanan Dinas	6.055.289.600,00	5.596.266.998,00	92,42
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Jumlah	28.170.452.391,00	26.735.460.521,00	94,91

Belanja Jasa merupakan realisasi yang paling terbesar yaitu sebesar Rp12.450.901.523,00, sedangkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan realisasi yang terkecil sebesar Rp20.000.000,00. Pada kelompok Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dan Tak Habis Pakai. Capaian realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp7.039.747.075,00 dan Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp60.680.000,00. Berikut disajikan komposisi anggaran dan realisasi Belanja Barang.

Grafik 5.5
Rincian Belanja Barang



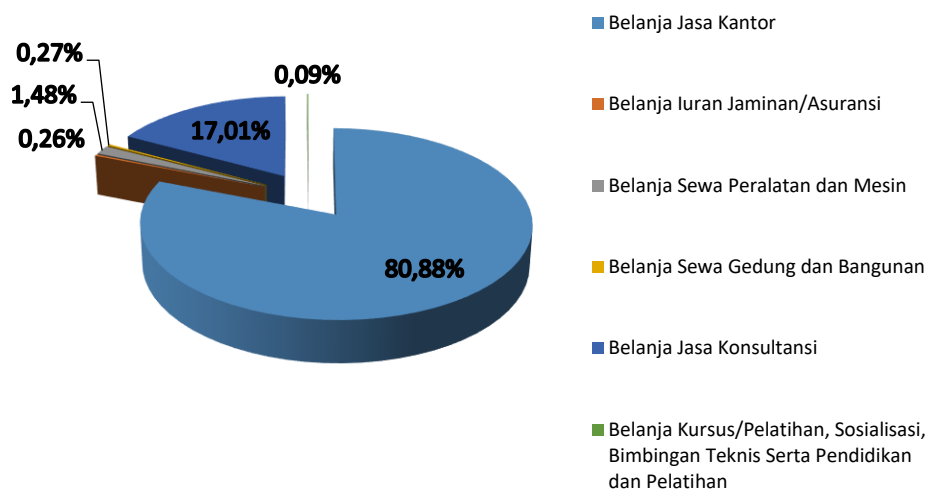
Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek belanja barang. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp1.207.330.000,00 dan berkontribusi pada belanja barang sebesar 17,00%. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp420.000,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat.

Realisasi belanja jasa mencapai 96,55 persen dari anggaran sebesar Rp12.895.988.372,00. Realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp10.496.339.591,00 memberikan kontribusi sebesar 62,28 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa.

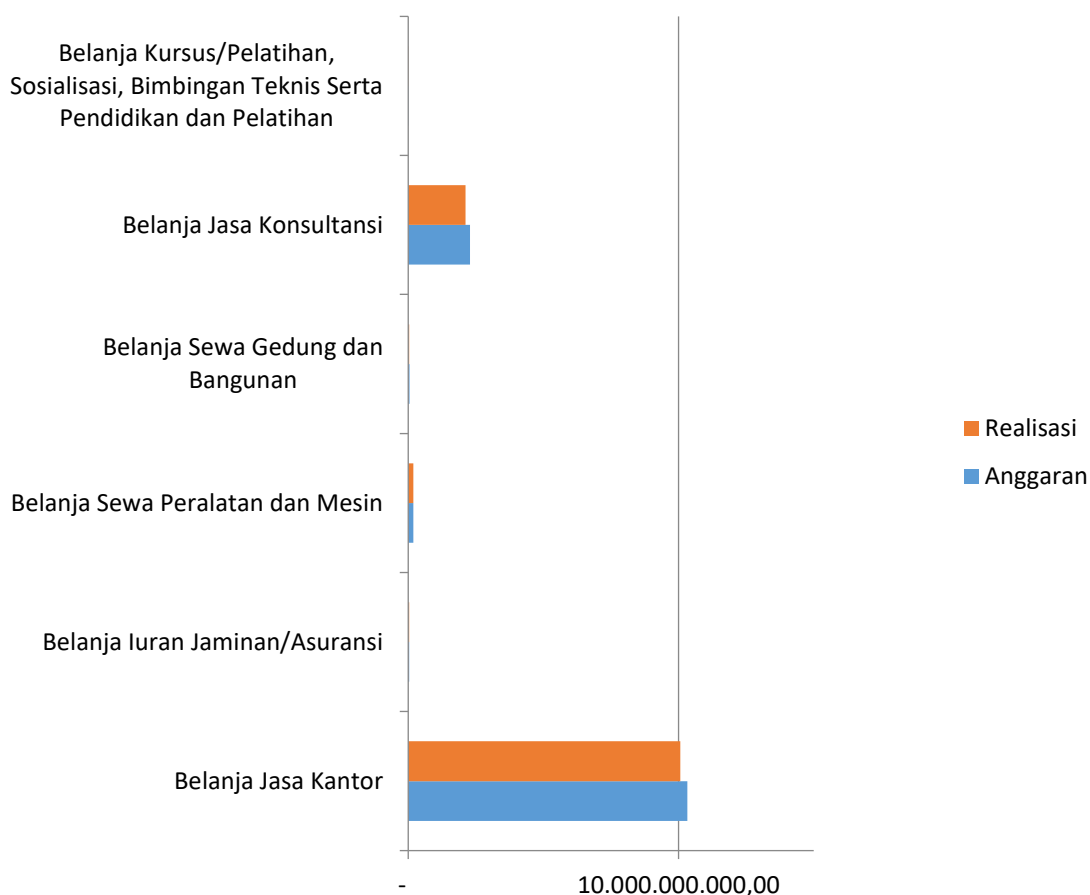
Dalam Belanja Jasa terdapat beberapa Sub rincian Belanja yang realisasinya mencapai 100% yaitu Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara, Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Belanja Jasa Kalibrasi, Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan. Namun terdapat juga sub rincian belanja yang capaian realisasinya dibawah 90% yaitu Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi, Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan.

Adapun Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :

Grafik 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Jasa



Gambar diatas menunjukkan komposisi Belanja Jasa Kantor merupakan yang tertinggi sebesar 80,88% dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar 0,09%.

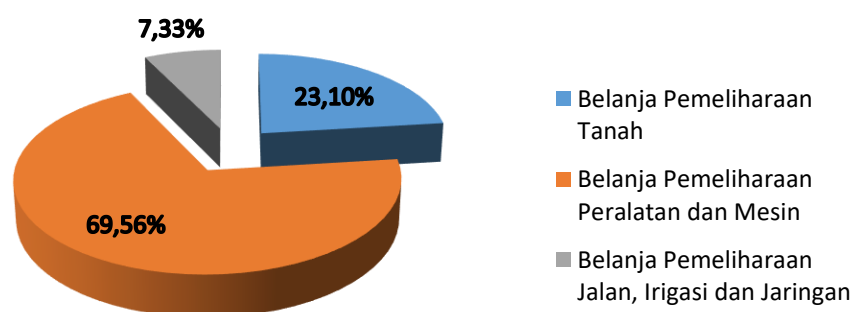


Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek Belanja Jasa. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Jasa adalah Belanja Jasa Kantor sebesar Rp10.070.461.254,00 berkontribusi sebesar 80,88% untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.118.499.771,00 dan berkontribusi pada belanja barang sebesar 17,01%. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp11.500.000,00 pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan.

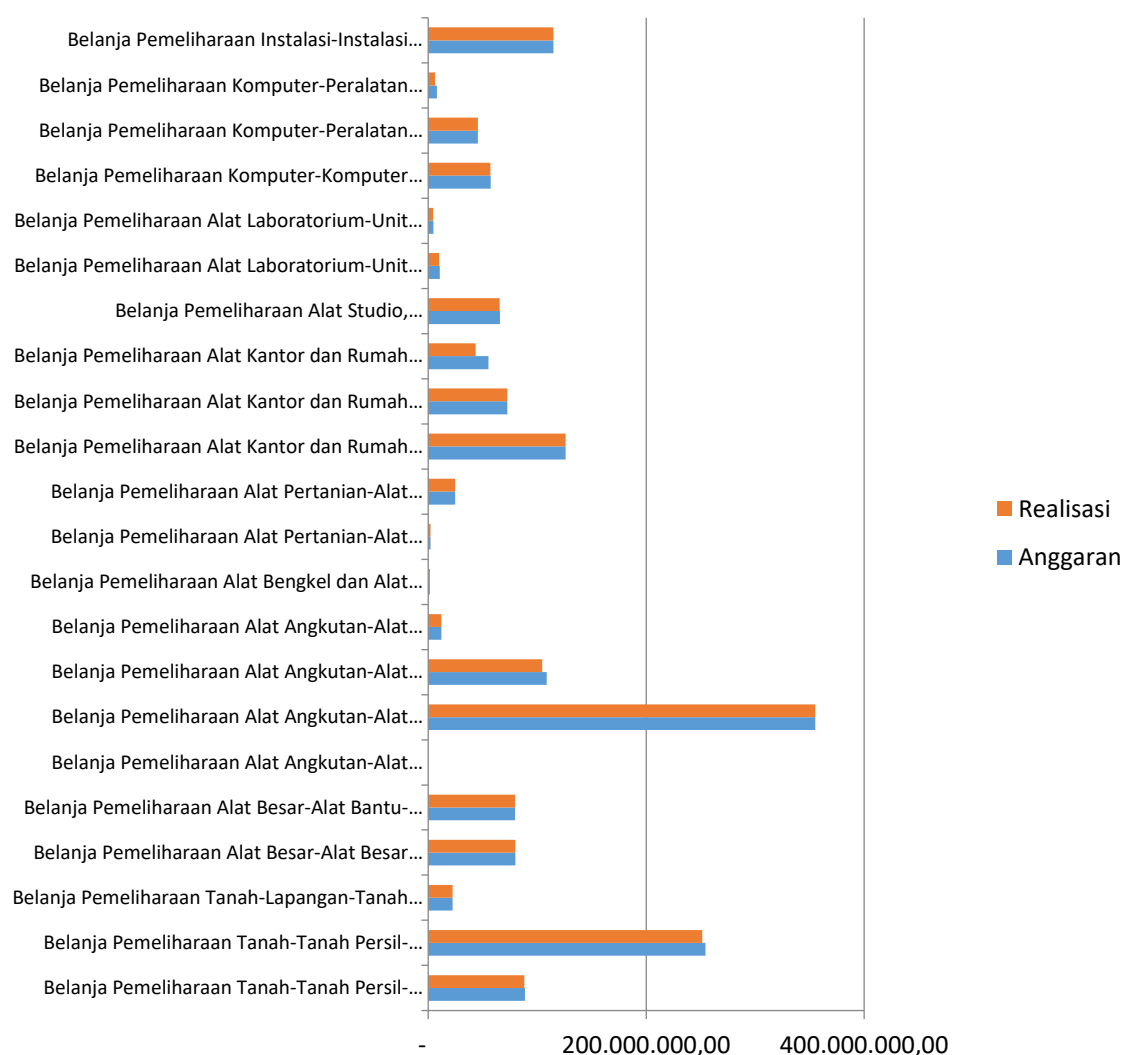
Realisasi Belanja Pemeliharaan mencapai 98,59 persen dari anggaran sebesar Rp1.590.279.128,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.567.864.925,00 memberikan kontribusi sebesar 5,86 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa.

Dalam Belanja Pemeliharaan terdapat beberapa Sub rincian Belanja yang realisasinya mencapai 100% yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak dan Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya. Namun terdapat juga sub rincian belanja yang capaian realisasinya 99% atau dibawah dari 99% yaitu; Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi, Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan. Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :

Grafik 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Belanja Pemeliharaan



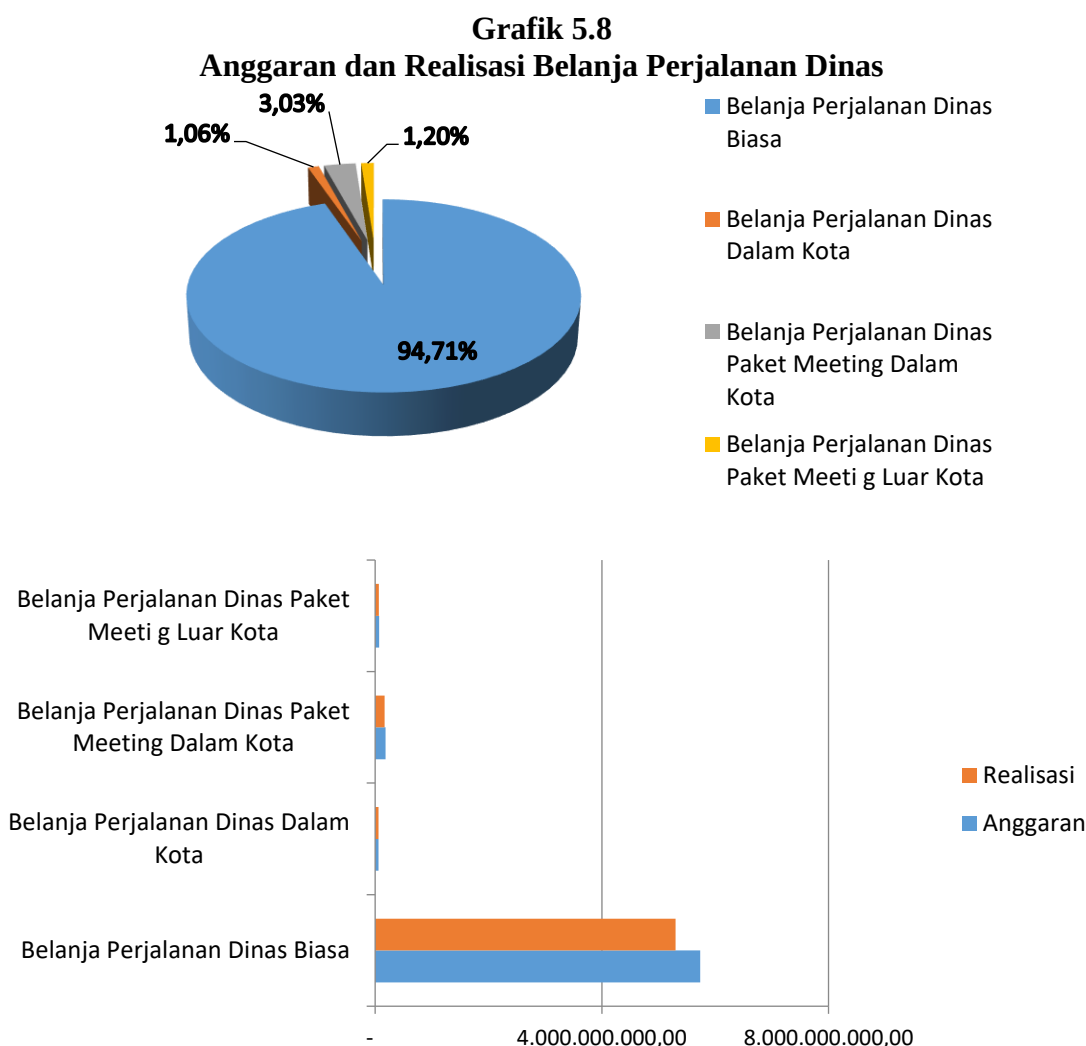
Gambar diatas menunjukkan komposisi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin merupakan yang tertinggi sebesar 69,56% dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 7,33%.



Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek Belanja Pemeliharaan. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp355.136.729,00 berkontribusi sebesar 22,65 persen. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp1.385.000,00 pada Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas terealisasi mencapai 92,42 persen dari anggaran sebesar Rp6.055.289.600,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.596.266.998,00 memberikan kontribusi sebesar 20,93 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.

Dalam Belanja Perjalanan Dinas tidak terdapat Belanja yang realisasinya mencapai 100% yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota capaian realisasi dibawah 100%. Adapun Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :



Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya terdiri satu item. Jumlah realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Bantuan Sosial	18.611.549.695,00	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial hanya terdiri satu item yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat. Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18.611.549.695,00 atau 92,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.169.557.778,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	28.969.316.368,00	23.999.177.764,66

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal asset tetap lainnya. Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp28.969.316.368,00 atau 93,54 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp30.968.751.785,00. Realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.970.138.603,34 atau 20,71 persen dibandingkan belanja modal yang terealisasi sebesar Rp23.999.177.764,66 pada tahun 2022. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

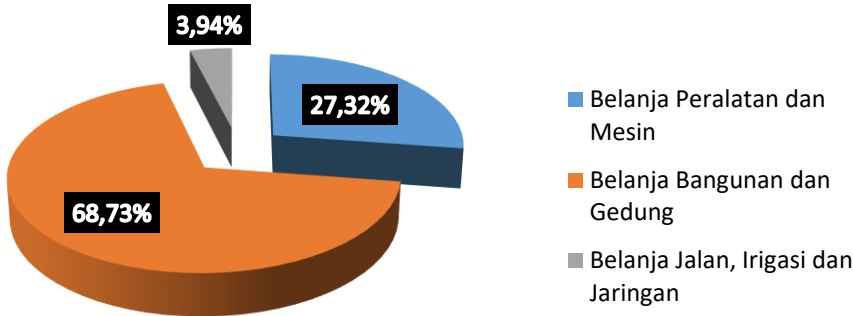
Tabel 5.7
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Peralatan dan Mesin	8.209.289.785,00	7.915.346.203,00	96,42	5.911.137.940,00
Belanja Bangunan dan Gedung	21.378.982.000,00	19.912.001.498,00	93,14	6.400.592.144,66
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.380.480.000,00	1.141.968.667,00	82,72	11.687.447.680,00
	30.968.751.785,00	28.969.316.368,00	93,54	23.999.177.764,66

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 mencapai 96,42 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.209.289.785,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin memberikan kontribusi sebesar 27,32 persen terhadap total realisasi

belanja modal. Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp19.912.001.498,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.378.982.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 68,73 persen terhadap total realisasi belanja modal. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp1.141.968.667,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.380.480.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan memberikan kontribusi sebesar 3,94 persen terhadap total realisasi belanja modal. Berikut disajikan komposisi belanja belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

Grafik 5.9
Komposisi Belanja Modal Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.915.346.203,00	5.911.137.940,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.915.346.203,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.209.289.785,00. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,91 persen atau naik sebesar Rp2.004.208.263,00 dibandingkan belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp5.911.137.940,00 pada tahun 2022. Adapun rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Alat Besar	821.495.100,00	803.125.000,00	(18.370.100,00)	97,76
Belanja Modal Alat Angkutan	4.268.550.054,00	4.061.730.540,00	(206.819.514,00)	95,15
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	(28.329.000,00)	98,43
Belanja Modal Alat Pertanian	100.685.950,00	100.455.000,00	(230.950,00)	99,77
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	206.958.822,00	197.389.163,00	(9.569.659,00)	95,38
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	219.698.151,00	217.500.000,00	(2.198.151,00)	99,00
Belanja Modal Komputer	788.276.208,00	759.850.000,00	(28.426.208,00)	96,39
Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00	100,00
	8.209.289.785,00	7.915.346.203,00	(293.943.582,00)	96,42

Realisasi Belanja Modal Alat Besar terealisasi sebesar Rp803.125.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp821.495.100,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.370.100,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 10,15 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp4.061.730.540,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.268.550.054,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp206.819.514,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 51,31 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp1.771.671.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.329.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 22,38 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp100.455.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.685.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp230.950,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,27 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp197.389.163,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp206.958.822,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.569.659,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

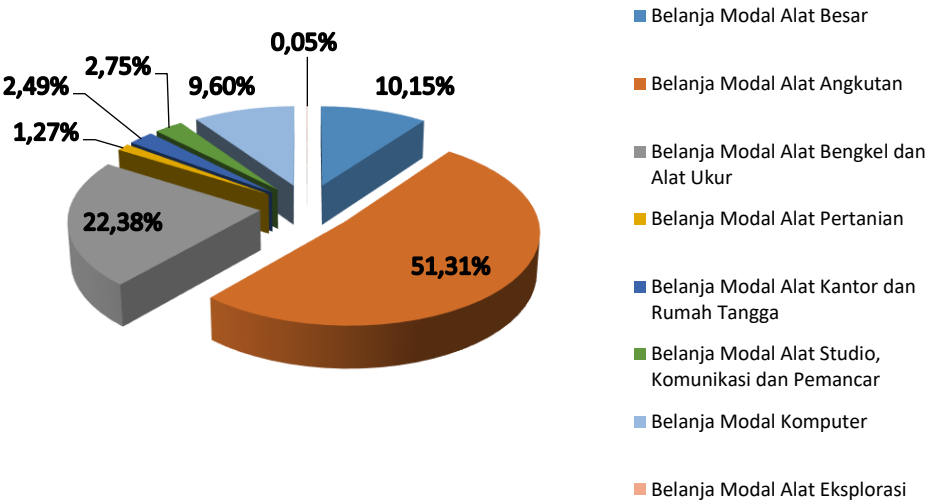
Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terealisasi sebesar Rp217.500.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp219.698.151,00 sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.198.151,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,75 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp759.850.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp788.276.208,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 9,60 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi terealisasi sebesar Rp3.625.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.625.500,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Grafik 5.10
Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.912.001.498,00	6.400.592.144,66

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp19.912.001.498,00 atau 93,14 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.378.982.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 211,10 persen atau naik sebesar Rp13.511.409.353,34 dibandingkan belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp6.400.592.144,66 pada tahun 2022. Adapun rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan sebagai berikut:

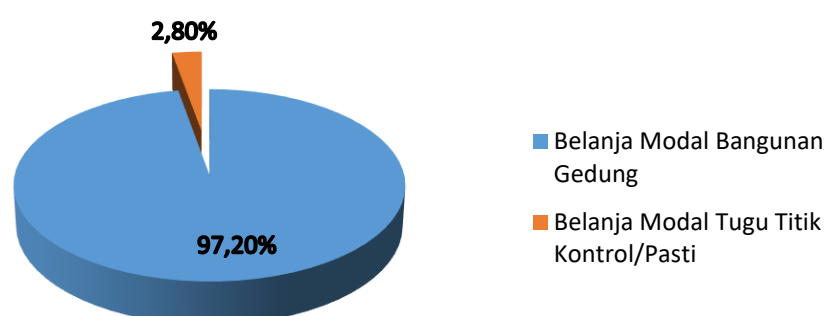
Tabel 5.9
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	20.778.982.000,00	19.353.946.766,00	-1.425.035.234,00	93,14
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	600.000.000,00	558.054.732,00	-41.945.268,00	93,01
Jumlah	21.378.982.000,00	19.912.001.498,00	-2.999.264.276,18	93,14

Belanja modal gedung dan bangunan terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. Belanja Modal Bangunan Gedung berupa pengadaan bangunan gedung tempat kerja terealisasi sebesar Rp19.353.946.766,00 atau mencapai 93,14 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.778.982.000,00. Berdasarkan anggaran dan realisasi tersebut, maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.425.035.234,00 yang belum digunakan untuk pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

Belanja modal gedung dan bangunan berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas terealisasi sebesar 93,01 persen dari anggaran sebesar Rp558.054.732,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,80 persen terhadap total realisasi belanja gedung dan bangunan. Berikut disajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

Grafik 5.11
Komposisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan



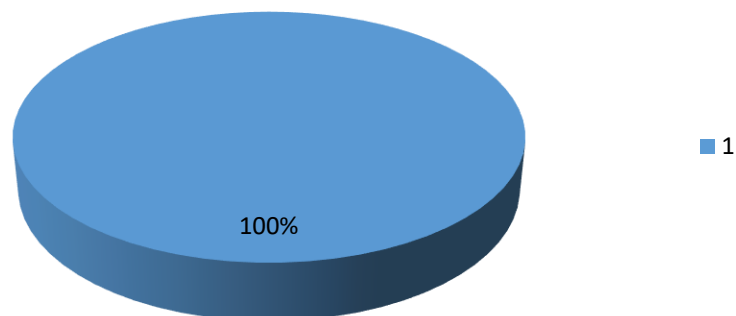
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	1.141.968.667,00	11.687.447.680,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.141.968.667,00 atau sebesar 82,72 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp1.380.480.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan sebesar Rp10.545.479.013,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp11.687.447.680,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2023.

Tabel 5.10
Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Instalasi	1.380.480.000,00	1.141.968.667,00	(238.511.333,00)	82,72
Jumlah	1.380.480.000,00	1.141.968.667,00	(238.511.333,00)	82,72

Grafik 5.12
Komposisi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA	(76.360.654.403,00)	(84.816.864.865,66)

Surplus/(deficit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp76.360.654.403,00. Jumlah defisit terealisasi mencapai 91,32 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp83.620.110.938,00. Jumlah defisit LRA tahun 2023 turun sebesar 9,97 persen atau Rp8.456.210.462,66 dari jumlah defisit tahun 2022 sebesar Rp84.816.864.865,66.

5.2 Penjelasan Pos dalam Neraca

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
194.882.728.744,66	165.843.271.437,66

5.2.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2023 dengan perbandingan 31 Desember 2022:

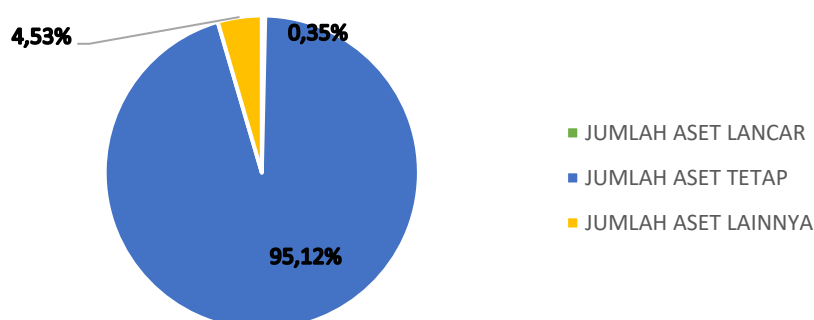
Tabel 5.11
Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lancar	681.286.430,00	491.530.295,00
Aset Tetap	185.377.576.850,66	156.757.555.569,66
Aset Lainnya	8.823.865.464,00	8.594.185.573,00
Jumlah	194.882.728.744,66	165.843.271.437,66

Nilai aset per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.039.457.307,00 atau naik 17,51 persen dari total aset per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp165.843.271.437,66. Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 berkontribusi sebesar 95,12 persen terhadap total aset. Berikut ini disajikan grafik kontribusi jenis aset terhadap total aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Grafik 5.13

Kontribusi Berdasarkan Klasifikasi Aset



5.2.1.1 Aset Lancar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
681.295.430,00	491.530.295,00

Aset lancar yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Piutang Pendapatan	351.074.000,00	196.047.000,00
Penyisihan Piutang	-	-
Beban dibayar dimuka	(1.755.370,00)	(980.235,00)
Persediaan	331.976.800,00	296.463.530,00
Jumlah	681.295.430,00	491.530.295,00

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

1.Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan menunjukkan Bahwa masih terdapat kas yang bersumber dari Pendapatan asli daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

2.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 berupa sisa uang persediaan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga disajika sebesar Rp0,00. Berdasarkan rekening koran pada PT Bank Sulteng nomor rekening 0010103256314 seluruh kas telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2023.

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
351.074.000,00	196.047.000,00

3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebesar Rp351.074.000,00 dan Rp196.047.000,00 merupakan piutang retribusi jasa pelabuhan. Piutang tersebut merupakan klaim atas pendapatan jasa pelayanan pelabuhan bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari oleh wajib retribusi. Piutang pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp155.027.000,00 atau 79,08 persen dibandingkan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.047.000,00.

Tabel 5.13
Piutang dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023

Uraian	Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Donggala) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Bulan Desember 2022)	104.559.000,00	522.795,00	104.036.205,00
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Ogotua) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Bulan Desember 2022)	100.915.000,00	504.575,00	100.410.425,00
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Paranggi) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Bulan Desember 2022)	3.705.000,00	18.525,00	3.686.475,00
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Pagimana) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Bulan Desember 2021)	23.780.000,00	118.900,00	23.661.100,00
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Mato) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Bulan Desember 2021)	10.820.000,00	54.100,00	10.765.900,00
- Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Kolonodale) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Bulan Desember 2022)	2.295.000,00	11.475,00	2.283.525,00
- Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Bulan Desember 2022)	105.000.000,00	525.000,00	104.475.000,00
Total	351.074.000,00	1.755.370,00	349.318.630,00

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyisihan atas piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.755.370,00. Jumlah penyisihan piutang menggambarkan estimasi atas piutang yang memiliki kemungkinan untuk tidak tertagih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp349.318.630,00. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp775.135,00 atau 79,08% dibandingkan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp980.235,00. Nilai peningkatan penyisihan piutang diakui sebagai beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 tidak terdapat perbedaan antara beban dibayar dimuka tahun 2023 dengan 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Persediaan	331.967.800,00	296.463.530,00

Persediaan per 31 Desember 2023 berkurang sebesar Rp331.967.800,00 atau 90,60 persen dari nilai persediaan per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp35.504.270,00. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan, persediaan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp331.967.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	331.967.800,00	296.463.530,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	331.967.800,00	296.463.530,00

Persediaan bahan pakai habis Per 31 Desember 2023 sebesar Rp331.967.800,00 terdiri atas:

- ATK	31.870.800,00
- Prangko dan Meterai	1.955.000,00
- Bibit	81.120.000,00
- Bahan Makanan	16.422.000,00
- Bahan Kemasan	310.000,00
- Pakan Terapung	200.290.000,00
Jumlah	331.967.800,00

Seluruh Persediaan yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdistribusi ke Kantor Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14
Persediaan Per 31 Desember 2023 Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	2023	2022
Dinas Kelautan dan Perikanan	27.857.600,00	55.764.000,00
UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	17.653.700,00	103.279.530,00
UPT Balai Perbenihan Perikanan	282.955.000,00	133.063.000,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	3.040.000,00	657.500,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	301.500,00	1.831.500,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III	-	1.058.000,00
UPT Perikanan Wilayah IV	160.000,00	810.000,00
Jumlah	331.967.800,00	296.463.530,00

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
185.377.576.850,66	156.757.555.569,66

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp185.377.576.850,66. Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,26 persen per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp156.757.555.569,66. Berikut disajikan rincian aset tetap per 31 Desember 2023 dengan perbandingan 31 Desember 2022:

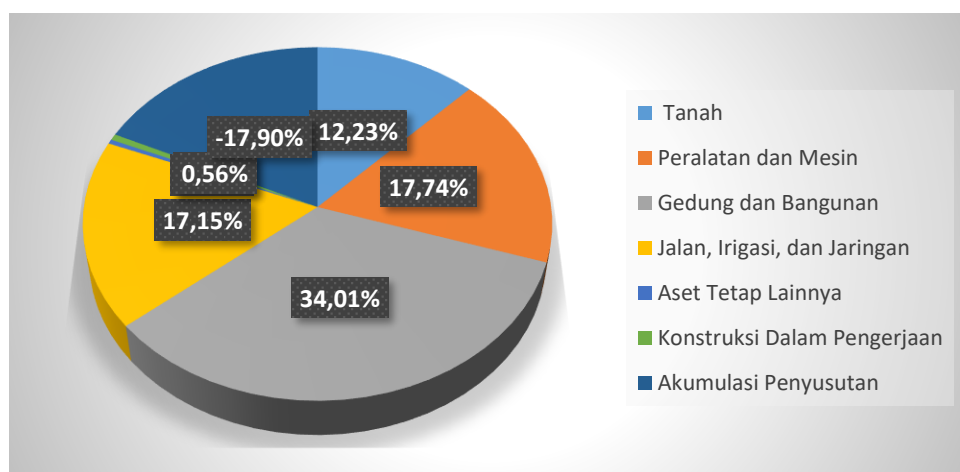
Tabel 5.15
Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Tanah	35.308.468.080,00	35.217.773.080,00
Peralatan dan Mesin	51.239.206.084,00	53.500.365.403,00
Gedung dan Bangunan	98.230.658.569,66	73.362.029.899,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.538.570.928,00	47.681.845.046,00
Aset Tetap Lainnya	1.139.821.321,00	1.139.821.321,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.625.884.616,00	674.457.500,00
Akumulasi Penyusutan	-51.705.032.748,00	-54.818.736.689,00
Jumlah	185.377.576.850,66	156.757.555.560,32

1. Nilai perolehan tanah disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.308.468.080,00 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sebesar Rp90.695.000,00 atau 0,26%.
2. Nilai perolehan peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.239.206.084,00 mengalami penurunan 4,23 persen atau sebesar Rp2.261.159.319,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.500.365.403,00.
3. Nilai perolehan gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.230.658.569,66 mengalami peningkatan 33,90 persen atau sebesar Rp24.868.628.661,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp73.362.029.908,66.
4. Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp49.538.570.928,00 mengalami peningkatan 3,89 persen atau sebesar Rp1.856.725.882,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp47.681.845.046,00.
5. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.139.821.321,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi per 31 Desember 2022.
6. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.625.884.616,00.

Gedung dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 38,78 persen terhadap total aset tetap, hal ini berarti gedung dan bangunan merupakan jenis aset yang paling besar dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan komposisi dari aset tetap per 31 Desember 2023.

Grafik 5.14
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2023



Selain aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakompatabel) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Barang Ekstrakompatabel Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Tanah	-	-
Peralatan Dan Mesin	303.442.000,00	1.126.652.500,00
Gedung Dan Bangunan	166.887.000,00	518.849.000,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.800.000,00	15.800.000,00
Jumlah	486.129.000,00	1.661.301.500,00

Berdasarkan tabel 5.19 jumlah barang ekstrakompatabel per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp486.129.000,00.

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
35.308.468.080,00	35.217.773.080,00

1. Tanah

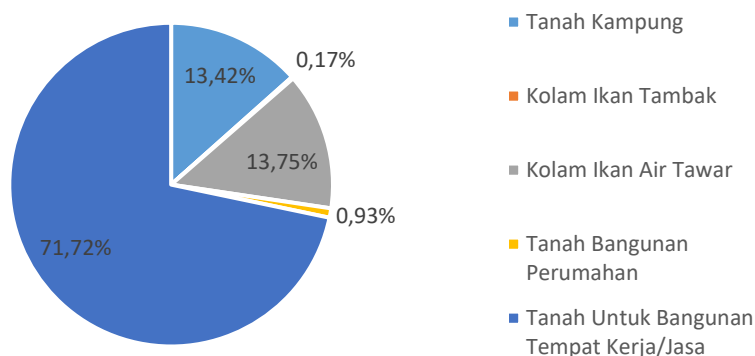
Tanah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp35.165.273.080,00, tidak terdapat perbedaan jumlah dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Tanah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Tanah Kampung	4.739.294.000,00	4.739.294.000,00
Kolam Ikan Tambak	60.000.000,00	60.000.000,00
Kolam Ikan Air Tawar	4.855.800.000,00	4.855.800.000,00
Tanah Bangunan Perumahan	329.400.000,00	329.400.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	25.323.974.080,00	25.233.279.080,00
Jumlah	35.308.468.080,00	35.217.773.080,00

Untuk menggambarkan komposisi aset tanah yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berikut disajikan grafik berikut ini

Grafik 5.15
Komposisi Tanah per 31 Desember 2023



Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
51.239.206.084,00	53.500.365.403,00

2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp51.239.206.084,00. Nilai tersebut menurun 4,23 persen atau sebesar Rp2.261.159.319,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp53.500.365.403,00. Berikut rincian mutasi peralatan dan mesin dari 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023.

Tabel 5.18
Mutasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	53.500.365.403,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal	7.915.346.203,00
Reklasifikasi Antar KIB	0,00
Kapitalisasi dari Realisasi Barang dan Jasa	232.101.850,00
Jumlah Mutasi Bertambah	8.147.448.053,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi Pencatatan	10.374.052.372,00
Ekstrakomtabel	34.555.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	10.408.607.372,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	51.239.206.084,00

Mutasi bertambah nilai peralatan dan mesin berupa mutasi bertambah sebesar Rp7.915.346.203,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp 0,00. Berikut disajikan rincian belanja modal Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	803.125.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	4.061.730.540,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.771.671.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	100.455.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	197.389.163,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	217.500.000,00
Belanja Modal Komputer	759.850.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.625.500,00
Jumlah	7.915.346.203,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	98.230.658.569,66	73.362.029.899,32

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.230.658.569,66, dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.362.029.908,66 maka terdapat peningkatan sebesar Rp24.868.628.661,00. Berikut skema mutasi gedung dan bangunan dari 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023.

Tabel 5.20
Mutasi Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	73.362.029.908,66
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal	19.912.001.498,00
Dari Ekstrakomtabel	273.602.000,00
Hibah	4.686.296.573,00
Kapitalisasi dari Realisasi Barang dan Jasa	1.662.912.921,00
Reklasifikasi Antara KIB	0,00
Jumlah Mutasi Bertambah	26.534.812.992,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi Antara KIB	714.757.215,00
Reklasifikasi KDP	951.427.116,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.666.184.331,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	98.230.658.569,66

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.Jalan Irigasi dan Jaringan	49.538.570.928,00	47.681.845.046,00

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.538.570.928,00, dibandingkan dengan nilai jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.681.845.046,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp1.856.725.882,00. Berikut skema mutasi jalan, irigasi dan jaringan dari 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023.

Tabel 5.21
Mutasi Jalan Irigasi dan Jarignan

Jalan Irigasi dan Jarignan per 31 Desember 2022	47.681.845.046,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal	1.141.968.667,00
Kapitalisasi Realisasi Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi Antara KIB	714.757.215,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.856.725.882,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	-
Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	49.538.570.928,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.Aset Tetap Lainnya	1.139.821.321,00	1.139.821.321,00

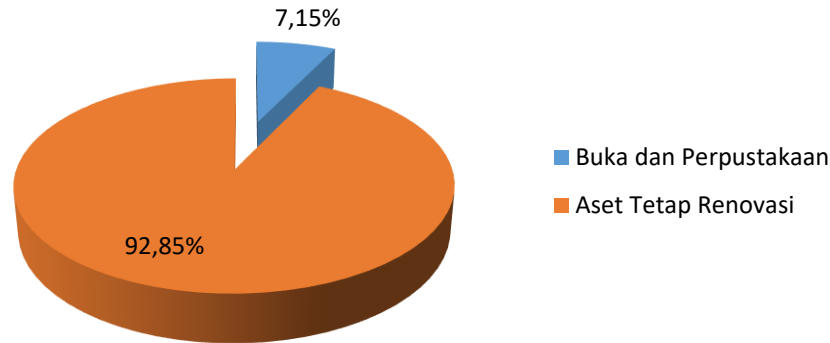
Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.139.821.321,00, jika dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.139.821.321,00 tidak terdapat perubahan aset tetap lainnya dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan rekapitulasi aset tetap lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023.

Tabel 5.22
Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Buka dan Perpustakaan	81.475.000,00	81.475.000,00
Aset Tetap Renovasi	1.058.346.321,00	1.058.346.321,00
Jumlah	1.139.821.321,00	1.139.821.321,00

Berikut disajikan komposisi rincian kelompok aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Grafik 5.17
Komposisi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023



Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.625.884.616,00	674.457.500,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.625.884.616,00, sementara itu konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp674.457.500,00.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
51.705.032.748,00	54.818.736.689,00

7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.705.032.748,00 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.818.736.689,00. Berikut disajikan rincian mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 5.23
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi Penyusutan Tahun-tahun Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	38.753.765.137,00	(9.817.019.674,00)	3.202.272.448,00	32.139.017.911,00
Gedung dan Bangunan	8.662.828.043,00	145.846.382,00	1.545.425.059,00	10.354.099.484,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	7.287.250.242,00	(9.500.944,00)	1.798.105.862,00	9.075.855.160,00
Aset Tetap Lainnya	114.893.267,00	-	21.166.926,00	136.060.193,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	54.818.736.689,00	(9.680.674.236,00)	6.566.970.295,00	51.705.032.748,00

Berdasarkan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.705.032.748,00 dan nilai perolehan aset sebesar Rp236.939.414.598,66 maka nilai buku aset tetap sebesar Rp185.234.381.850,66. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 5.24
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	35.165.273.080,00	-	35.165.273.080,00
Peralatan dan Mesin	51.239.206.084,00	(32.139.017.911,00)	19.100.188.173,00
Gedung dan Bangunan	98.230.658.569,66	(10.354.099.484,00)	87.876.559.085,66
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.538.570.928,00	(9.075.855.160,00)	40.462.715.768,00
Aset Tetap Lainnya	1.139.821.321,00	(136.060.193,00)	1.003.761.128,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.625.884.616,00	-	1.625.884.616,00
Jumlah	236.939.414.598,66	(51.705.032.748,00)	185.234.381.850,66

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
8.823.865.464,00	8.594.185.573,00

Aset lainnya yang disajikan dalam neraca berupa aset lain-lain. Aset lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan sebesar nilai bukunya yaitu Rp8.823.865.464,00, jika dibandingkan dengan aset lainnya tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp229.679.891,00.

5.2.2 Kewajiban

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
422.906.215,67	310.467.130,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp422.906.215,67. Kewajiban yang dimiliki berupa kewajiban jangka pendek yang akan diselesaikan sampai dengan 12 bulan ke depan. Berikut disajikan rincian kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.25

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-23
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Bunga	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	107.320.166,67	56.688.000,00
Utang Belanja	315.586.049,00	252.579.130,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	422.906.215,67	309.267.130,00

5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
107.320.166,67	57.888.000,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp107.320.166,67. Pendapatan diterima dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp50.632.166,67 atau 89,32 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp56.688.000,00.

5.2.2.2 Utang Belanja

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
315.586.049,00	252.579.130,00

Utang beban yang disajikan dalam neraca merupakan tagihan listrik, air, telepon, langganan surat kabar dan televisi yang belum dibayarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember 2023. Jumlah utang belanja mengalami kenaikan sebesar Rp63.006.919,00 atau 24,95 persen dibandingkan dengan nilai utang beban yang disajikan sebesar Rp252.579.130,00 dalam neraca per 31 Desember 2022. Berikut disajikan rincian atas utang beban.

Tabel 5.26
Utang Beban Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Beban Sewa	0,00	0,00
Utang Beban Listrik	287.356.476,00	250.099.780,00
Utang Beban Air	11.063.500,00	211.500,00
Utang Beban Telepon dan Internet	17.166.073,00	2.267.850,00
Jumlah	315.586.049,00	252.579.130,00

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
194.459.822.528,99	165.843.271.437,66

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.459.822.528,99 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.843.271.437,66. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2023

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL	165.534.004.307,66	128.733.908.325,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi ekuitas lainnya	227.951.562,00	7.063.396.350,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	76.360.654.403,00	95.869.488.945,66
EKUITAS AKHIR	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66

5.3 Penjelasan Pos dalam Laporan Operasional

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
19.951.884.491,33	6.027.313.761,67

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Tahun 2023 Pendapatan-LO sebesar Rp19.951.884.491,33.

Pendapatan-LO pada tahun 2023 berbeda dengan Pendapatan-LRA tahun 2023. Hal ini disebabkan perbedaan prinsip pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan jumlah pendapatan antara lain bersumber atas pendapatan atas retribusi jasa pelayanan pelabuhan yang belum diterima oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan bulan 31 Desember 2023. Berikut disajikan rekapitulasi pendapatan LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.27
Pendapatan LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	2023	2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	15.265.587.918,33	6.027.313.761,67
Pendapatan Transfer – LO	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LO	4.686.296.573,00	-
Jumlah	19.951.884.491,33	6.027.313.761,67

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
15.265.587.918,33	6.027.313.761,67

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

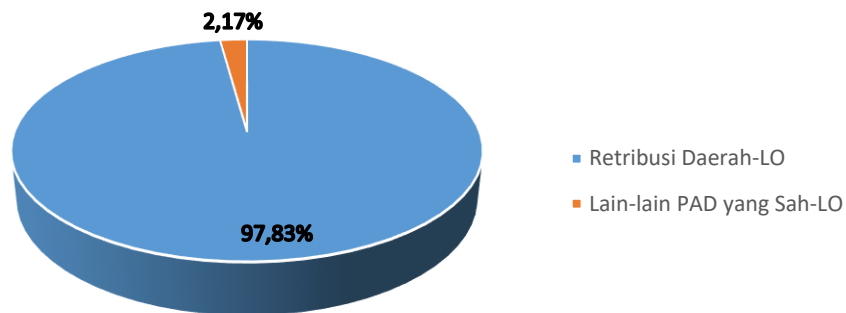
Pendapatan Asli Daerah-LO berupa pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa kepelabuhanan, penjualan hasil produksi usaha daerah dan pemberian izin usaha perikanan. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp15.265.587.918,33 mengalami peningkatan sebesar 153,27 persen dibandingkan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp13.924.570.729,66. Berikut disajikan rekapitulasi pendapatan asli daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dengan perbandingan 31 Desember 2022.

Tabel 5.28
Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	14.934.729.850,00	5.982.863.250,00
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	330.858.068,33	44.450.511,67
Jumlah	15.265.587.918,33	6.027.313.761,67

Pendapatan retribusi LO pada tahun 2023 disajikan sebesar Rp14.934.729.850,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp4.686.296.573,00, maka terdapat peningkatan nilai pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO sebesar Rp9.238.274.156,66. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan komposisi rincian pendapatan asli daerah LO.

Grafik 5.17
Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023



Terdapat perbedaan antara pendapatan asli daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang retribusi pelayanan jasa dan penyelesaian pendapatan diterima dimuka.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	4.686.296.573,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.686.296.573,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2 Beban Operasi	67.614.672.235,00	72.160.103.075,00

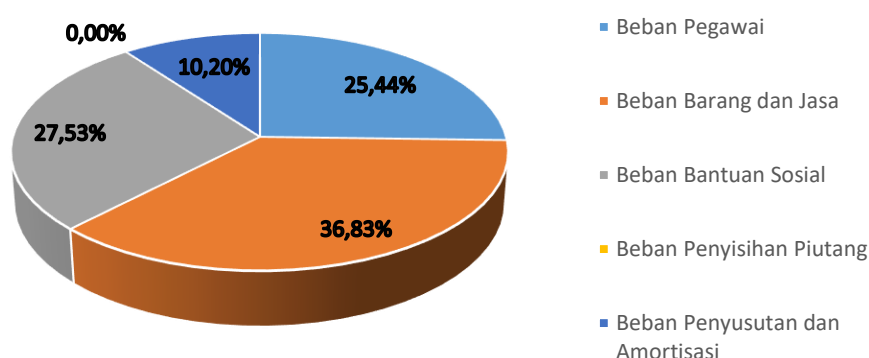
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berupa beban operasi tahun 2023 disajikan sebesar Rp67.614.672.235,00, menurun sebesar 6,30 persen dari beban operasi yang diakui tahun 2022 sebesar Rp72.160.103.075,00. Beban operasi terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyisihan piutang dan beban penyusutan dan amortisasi. Berikut rekapitulasi beban operasi pada tahun 2023 dan tahun 2022:

Tabel 5.29
Beban Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai - LO	17.204.540.669,00	15.945.059.489,00
Beban Barang dan Jasa - LO	24.902.503.399,00	49.526.244.645,00
Beban Bantuan Sosial - LO	18.611.549.695,00	-
Beban Penyisihan Piutang - LO	1.755.370,00	980.235,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	6.894.323.102,00	6.687.818.706,00
Jumlah	67.614.672.235,00	72.160.103.075,00

Berdasarkan tabel di atas, beban pegawai meningkat sebesar Rp1.259.481.180,00 atau 7,90 persen dibandingkan beban pegawai tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp17.204.540.669,00 memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen terhadap total beban. Beban barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp24.902.503.399,00 berkurang sebesar Rp24.623.741.246,00 dibandingkan beban barang dan jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp49.526.244.645,00 dan memberikan kontribusi sebesar 36,83 persen terhadap total beban atau lebih tinggi dibandingkan jenis beban lainnya. Beban bantuan social sebesar Rp18.611.549.695,00. Beban penyusutan dan amrotisasi pada tahun 2023 sebesar Rp6.894.323.102,00. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.755.370,00.

Grafik 5.18
Komposisi Beban Operasi Tahun 2023



Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
17.204.540.669,00	15.945.059.489,00

5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp17.204.540.669,00 mengalami peningkatan sebesar 7,90 persen atau sebesar Rp1.259.481.180,00 dibandingkan tahun 2022. Tidak terdapat perbedaan antara belanja pegawai dan beban pegawai. Beban gaji dan tunjangan dibebankan sebesar Rp9.504.846.236,00 atau meningkat sebesar 4,06 persen dibandingkan tahun 2022 dan berkontribusi sebesar 55,25 persen terhadap total beban pegawai tahun 2023. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp6.040.076.433,00 mengalami kenaikan sebesar 2,69 persen dibandingkan tahun 2022 yang dibebankan sebesar Rp5.881.942.758,00. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja memberikan kontribusi sebesar 35,11 persen. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp1.659.618.000,00 mengalami kenaikan sebesar 78,66 persen dibandingkan tahun 2022 yang dibebankan sebesar Rp928.949.250,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 9,65 persen. Berikut disajikan rincian beban pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.30
Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.504.846.236,00	9.134.167.481,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.040.076.433,00	5.881.942.758,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbang	1.659.618.000,00	928.949.250,00
	17.204.540.669,00	15.945.059.489,00

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
24.902.503.399,00	49.526.244.645,00

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa pada tahun 2023 sebesar Rp24.902.503.399,00 menurun sebesar 49,72 persen atau sebesar Rp24.623.741.246,00 dibandingkan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp49.526.244.645,00. Terdapat perbedaan antara belanja barang dan jasa beban barang dan jasa, berikut disajikan perbandingan antara beban dan belanja barang jasa tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.3 Beban Bantuan Sosial	18.611.549.695,00	0,00

Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp18.611.549.695,00. Dibandingkan tahun sebelumnya tidak terdapat beban bantuan social.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.894.323.102,00	6.687.818.706,00

Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp 6.894.323.102,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.5 Beban Penyisihan Piutang	1.755.370,00	980.235,00

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban penyisihan piutang merupakan beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih. Beban penyisihan piutang yang disajikan sebesar Rp1.755.370,00 merupakan beban penyisihan atas piutang retribusi jasa kepelabuhan. Jumlah beban penyisihan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp775.135,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.6 Beban Lain-lain	0,00	0,00

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp0,00.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)

5.3.2.7 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit-LO sebesar Rp(47.662.787.743,67) atau terjadi penurunan 27,93 persen atau sebesar Rp18.470.001.569,66 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp66.132.789.313,33. Hal tersebut menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan jumlah beban operasi tahun 2023.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.534.004.307,66 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.459.822.528,99. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2023 :

EKUITAS AWAL	165.534.004.307,66	128.733.908.325,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	227.951.562,00	7.063.396.350,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	76.360.654.403,00	95.869.488.945,66
EKUITAS AKHIR	194.459.822.528,99	165.534.004.307,66

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
165.534.004.307,66	128.733.908.325,33

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2023 berasal dari saldo ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp165.534.004.307,66.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(47.662.787.743,67)	(66.132.789.313,33)

5.4.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit-LO sebesar Rp47.662.787.743,67 atau terjadi peningkatan 27,93 persen atau sebesar

Rp18.470.001.569,66 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp66.132.789.313,33. Hal tersebut menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan jumlah beban operasi tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	84.756.562,00	7.063.396.350,00

Koreksi ekuitas lainnya berupa penyesuaian yang langsung mempengaruhi jumlah ekuitas sebagai dampak kesalahan pencatatan tahun sebelumnya ataupun pengaruh lainnya. Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp227.951.562,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	76.360.654.403,00	95.869.488.945,66

Pada tahun 2023 ekuitas untuk dikonsolidasikan disajikan sebesar Rp76.360.654.403,00. Ini merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara Perangkat Daerah dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 24 Mei 2024

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	14.406.600.000,00	14.779.702.850,00	373.102.850,00	102,59	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.416.000.000,00	5.492.727.800,00	76.727.800,00	101,42	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.000.000,00	63.020.000,00	12.020.000,00	123,57	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	51.000.000,00	63.020.000,00	12.020.000,00	123,57	
00.0.00.00.4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.580.000.000,00	3.634.007.800,00	54.007.800,00	101,51	
00.0.00.00.4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.580.000.000,00	3.634.007.800,00	54.007.800,00	101,51	
00.0.00.00.4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.785.000.000,00	1.795.700.000,00	10.700.000,00	100,60	
00.0.00.00.4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1.785.000.000,00	1.795.700.000,00	10.700.000,00	100,60	
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	296.375.050,00	103,30	
00.0.00.00.4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	296.375.050,00	103,30	
00.0.00.00.4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	296.375.050,00	103,30	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	381.800.000,00	380.510.000,00	(1.290.000,00)	99,66	
00.0.00.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	381.800.000,00	380.510.000,00	(1.290.000,00)	99,66	
00.0.00.00.4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	381.800.000,00	380.510.000,00	(1.290.000,00)	99,66	
00.0.00.00.4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	381.800.000,00	380.510.000,00	(1.290.000,00)	99,66	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	(6.887.643.685,00)	93,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.158.211.959,00	30.002.758.768,00	(2.155.453.191,00)	93,30	
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	713.252.000,00	672.662.097,00	(40.589.903,00)	94,31	
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	449.310.000,00	425.220.097,00	(24.089.903,00)	94,64	
01.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	449.310.000,00	425.220.097,00	(24.089.903,00)	94,64	
01.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.310.000,00	425.220.097,00	(24.089.903,00)	94,64	
01.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	120.700.000,00	120.600.000,00	(100.000,00)	99,92	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.700.000,00	120.600.000,00	(100.000,00)	99,92	
01.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.700.000,00	110.600.000,00	(100.000,00)	99,91	
01.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.600.000,00	82.955.000,00	(1.645.000,00)	98,06	
01.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.600.000,00	82.955.000,00	(1.645.000,00)	98,06	
01.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.700.000,00	34.905.000,00	(795.000,00)	97,77	
01.1.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.150.000,00	(850.000,00)	71,67	
01.1.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	244.010.000,00	221.665.097,00	(22.344.903,00)	90,84	
01.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.010.000,00	221.665.097,00	(22.344.903,00)	90,84	
01.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	224.510.000,00	202.195.097,00	(22.314.903,00)	90,06	
01.1.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	19.500.000,00	19.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.942.000,00	247.442.000,00	(16.500.000,00)	93,75	
01.1.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	263.942.000,00	247.442.000,00	(16.500.000,00)	93,75	
01.1.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.942.000,00	247.442.000,00	(16.500.000,00)	93,75	
01.1.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	53.592.000,00	53.592.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.592.000,00	53.592.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.592.000,00	53.592.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.000.000,00	61.500.000,00	(16.500.000,00)	78,85	
01.1.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	61.500.000,00	(16.500.000,00)	78,85	
01.1.01.07.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000,00	61.500.000,00	(16.500.000,00)	78,85	
01.1.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	132.350.000,00	132.350.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.350.000,00	132.350.000,00	0,00	100,00	
01.1.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.350.000,00	132.350.000,00	0,00	100,00	
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.118.783.762,00	18.218.998.118,00	(1.899.785.644,00)	90,56	
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	(1.875.088.315,00)	89,50	
01.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	(1.875.088.315,00)	89,50	
01.1.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	17.852.208.984,00	15.977.120.669,00	(1.875.088.315,00)	89,50	
01.1.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.255.737.162,00	9.504.846.236,00	(1.750.890.926,00)	84,44	
01.1.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.814.178.818,00	7.559.890.680,00	(1.254.288.138,00)	85,77	
01.1.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	8.814.178.818,00	7.559.890.680,00	(1.254.288.138,00)	85,77	
01.1.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	839.076.768,00	685.890.472,00	(153.186.296,00)	81,74	
01.1.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	839.076.768,00	685.890.472,00	(153.186.296,00)	81,74	
01.1.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	796.400.000,00	610.390.000,00	(186.010.000,00)	76,64	
01.1.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	796.400.000,00	610.390.000,00	(186.010.000,00)	76,64	
01.1.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	326.061.500,00	225.015.000,00	(101.046.500,00)	69,01	
01.1.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	326.061.500,00	225.015.000,00	(101.046.500,00)	69,01	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	461.235.651,00	415.473.540,00	(45.762.111,00)	90,08	
01.1.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	461.235.651,00	415.473.540,00	(45.762.111,00)	90,08	
01.1.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.590.727,00	8.082.262,00	(10.508.465,00)	43,47	
01.1.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.590.727,00	8.082.262,00	(10.508.465,00)	43,47	
01.1.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	193.698,00	104.282,00	(89.416,00)	53,84	
01.1.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	193.698,00	104.282,00	(89.416,00)	53,84	
01.1.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.045.478.142,00	6.040.076.433,00	(5.401.709,00)	99,91	
01.1.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.045.478.142,00	6.040.076.433,00	(5.401.709,00)	99,91	
01.1.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.045.478.142,00	6.040.076.433,00	(5.401.709,00)	99,91	
01.1.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.993.680,00	432.198.000,00	(118.795.680,00)	78,44	
01.1.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.993.680,00	432.198.000,00	(118.795.680,00)	78,44	
01.1.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	44.496.840,00	1.500.000,00	(42.996.840,00)	3,37	
01.1.02.01.5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	71.850.000,00	42.282.000,00	(29.568.000,00)	58,85	
01.1.02.01.5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.900.000,00	53.550.000,00	(7.350.000,00)	87,93	
01.1.02.01.5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	373.746.840,00	334.866.000,00	(38.880.840,00)	89,60	
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.810.284.097,00	1.786.256.779,00	(24.027.318,00)	98,67	
01.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.761.580.651,00	1.737.790.801,00	(23.789.850,00)	98,65	
01.1.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.112.290.000,00	1.092.170.000,00	(20.120.000,00)	98,19	
01.1.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.112.290.000,00	1.092.170.000,00	(20.120.000,00)	98,19	
01.1.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.070.290.000,00	1.050.170.000,00	(20.120.000,00)	98,12	
01.1.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.006.370.000,00	1.001.210.000,00	(5.160.000,00)	99,49	
01.1.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	63.920.000,00	48.960.000,00	(14.960.000,00)	76,60	
01.1.02.02.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.290.651,00	645.620.801,00	(3.669.850,00)	99,43	
01.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	328.517.651,00	327.492.876,00	(1.024.775,00)	99,69	
01.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	328.517.651,00	327.492.876,00	(1.024.775,00)	99,69	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.975.846,00	22.166.532,00	(809.314,00)	96,48	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.605.980,00	15.542.030,00	(63.950,00)	99,59	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.255.950,00	65.210.400,00	(45.550,00)	99,93	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.244.875,00	1.244.875,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.600.000,00	148.495.030,00	(104.970,00)	99,93	
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.625.000,00	50.624.009,00	(991,00)	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.780.000,00	65.700.000,00	(80.000,00)	99,88	
01.1.02.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.780.000,00	65.700.000,00	(80.000,00)	99,88	
01.1.02.02.5.1.02.03.02.0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	65.780.000,00	65.700.000,00	(80.000,00)	99,88	
01.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	218.993.000,00	216.427.925,00	(2.565.075,00)	98,83	
01.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	218.993.000,00	216.427.925,00	(2.565.075,00)	98,83	
01.1.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	218.993.000,00	216.427.925,00	(2.565.075,00)	98,83	
01.1.02.02.5.2	BELANJA MODAL	48.703.446,00	48.465.978,00	(237.468,00)	99,51	
01.1.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.703.446,00	48.465.978,00	(237.468,00)	99,51	
01.1.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.965.978,00	18.965.978,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.965.978,00	18.965.978,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.115.978,00	4.115.978,00	0,00	100,00	
01.1.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29.737.468,00	29.500.000,00	(237.468,00)	99,20	
01.1.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.737.468,00	29.500.000,00	(237.468,00)	99,20	
01.1.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	29.737.468,00	29.500.000,00	(237.468,00)	99,20	
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.364.000,00	195.061.989,00	(302.011,00)	99,85	
01.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	195.364.000,00	195.061.989,00	(302.011,00)	99,85	
01.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.364.000,00	195.061.989,00	(302.011,00)	99,85	
01.1.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	65.264.000,00	64.988.350,00	(275.650,00)	99,58	
01.1.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.264.000,00	64.988.350,00	(275.650,00)	99,58	
01.1.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.264.000,00	64.988.350,00	(275.650,00)	99,58	
01.1.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	130.100.000,00	130.073.639,00	(26.361,00)	99,98	
01.1.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.100.000,00	130.073.639,00	(26.361,00)	99,98	
01.1.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.100.000,00	130.073.639,00	(26.361,00)	99,98	
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103.024.000,00	102.766.000,00	(258.000,00)	99,75	
01.1.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.024.000,00	102.766.000,00	(258.000,00)	99,75	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.024.000,00	102.766.000,00	(258.000,00)	99,75	
01.1.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	39.174.000,00	39.166.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.1.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.174.000,00	39.166.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.1.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.444.000,00	23.436.000,00	(8.000,00)	99,97	
01.1.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.850.000,00	63.600.000,00	(250.000,00)	99,61	
01.1.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.850.000,00	63.600.000,00	(250.000,00)	99,61	
01.1.02.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	16.600.000,00	(250.000,00)	98,52	
01.1.02.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	157.902.681,00	157.792.681,00	(110.000,00)	99,93	
01.1.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	157.902.681,00	157.792.681,00	(110.000,00)	99,93	
01.1.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.902.681,00	157.792.681,00	(110.000,00)	99,93	
01.1.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	32.682.681,00	32.682.681,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.682.681,00	32.682.681,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.578.181,00	10.578.181,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.604.500,00	5.604.500,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.1.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.520.000,00	122.410.000,00	(110.000,00)	99,91	
01.1.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.520.000,00	122.410.000,00	(110.000,00)	99,91	
01.1.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.620.000,00	112.510.000,00	(110.000,00)	99,90	
01.1.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.260.000,00	41.870.000,00	(390.000,00)	99,08	
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.290.790,00	176.545.415,00	(4.745.375,00)	97,38	
01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.084.190,00	49.206.715,00	(877.475,00)	98,25	
01.1.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.582.389,00	38.704.914,00	(877.475,00)	97,78	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.582.389,00	38.704.914,00	(877.475,00)	97,78	
01.1.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	39.582.389,00	38.704.914,00	(877.475,00)	97,78	
01.1.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.582.389,00	38.704.914,00	(877.475,00)	97,78	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	373.865,00	276.390,00	(97.475,00)	73,93	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.314.284,00	1.314.284,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.389.240,00	5.389.240,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.855.000,00	24.075.000,00	(780.000,00)	96,86	
01.1.05.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2	BELANJA MODAL	10.501.801,00	10.501.801,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.501.801,00	10.501.801,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.501.801,00	10.501.801,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.630.134,00	6.630.134,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.630.134,00	6.630.134,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.871.667,00	3.871.667,00	0,00	100,00	
01.1.05.03.5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.871.667,00	3.871.667,00	0,00	100,00	
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.563.600,00	24.789.700,00	(773.900,00)	96,97	
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105.643.000,00	102.549.000,00	(3.094.000,00)	97,07	
01.1.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	105.643.000,00	102.549.000,00	(3.094.000,00)	97,07	
01.1.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.643.000,00	102.549.000,00	(3.094.000,00)	97,07	
01.1.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	59.003.000,00	58.959.000,00	(44.000,00)	99,93	
01.1.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.003.000,00	58.959.000,00	(44.000,00)	99,93	
01.1.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.003.000,00	58.959.000,00	(44.000,00)	99,93	
01.1.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.650.000,00	38.950.000,00	(2.700.000,00)	93,52	
01.1.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.650.000,00	38.950.000,00	(2.700.000,00)	93,52	
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00	13.500.000,00	(2.700.000,00)	83,33	
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.05.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.990.000,00	4.640.000,00	(350.000,00)	92,99	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.05.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.990.000,00	4.640.000,00	(350.000,00)	92,99	
01.1.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.990.000,00	4.640.000,00	(350.000,00)	92,99	
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.358.996.796,00	2.289.852.236,00	(69.144.560,00)	97,07	
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.907.287,00	14.907.169,00	(118,00)	100,00	
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.756.328.892,00	1.710.905.517,00	(45.423.375,00)	97,41	
01.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	574.658.497,00	564.476.068,00	(10.182.429,00)	98,23	
01.1.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	26.280.000,00	26.280.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.280.000,00	26.280.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.378.497,00	526.196.068,00	(10.182.429,00)	98,10	
01.1.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	447.075.497,00	442.592.233,00	(4.483.264,00)	99,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	447.075.497,00	442.592.233,00	(4.483.264,00)	99,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.007.000,00	2.000.000,00	(7.000,00)	99,65	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.969.990,00	67.368.675,00	(601.315,00)	99,12	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.027.260,00	112.527.000,00	(1.500.260,00)	98,68	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.481.300,00	12.578.470,00	(902.830,00)	93,30	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	59.177.320,00	58.094.265,00	(1.083.055,00)	98,17	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.580.995,00	19.564.640,00	(16.355,00)	99,92	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.439.792,00	6.439.789,00	(3,00)	100,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.503.600,00	1.470.000,00	(33.600,00)	97,77	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.175.740,00	53.142.894,00	(32.846,00)	99,94	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	15.060.000,00	15.055.000,00	(5.000,00)	99,97	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	5.445.000,00	(15.000,00)	99,73	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.125.000,00	4.060.000,00	(65.000,00)	98,42	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	402.500,00	402.500,00	0,00	100,00	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	59.200.000,00	59.029.000,00	(171.000,00)	99,71	
01.1.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.000.000,00	4.641.100,00	(2.358.900,00)	66,30	
01.1.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	4.641.100,00	(2.358.900,00)	66,30	
01.1.06.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.000.000,00	4.641.100,00	(2.358.900,00)	66,30	
01.1.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	74.750.000,00	72.550.935,00	(2.199.065,00)	97,06	
01.1.06.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	70.000.000,00	67.885.935,00	(2.114.065,00)	96,98	
01.1.06.02.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	70.000.000,00	67.885.935,00	(2.114.065,00)	96,98	
01.1.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.750.000,00	4.665.000,00	(85.000,00)	98,21	
01.1.06.02.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.790.000,00	(40.000,00)	97,81	
01.1.06.02.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.875.000,00	(45.000,00)	98,46	
01.1.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.553.000,00	6.411.800,00	(1.141.200,00)	84,89	
01.1.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.553.000,00	6.411.800,00	(1.141.200,00)	84,89	
01.1.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.553.000,00	6.411.800,00	(1.141.200,00)	84,89	
01.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.181.670.395,00	1.146.429.449,00	(35.240.946,00)	97,02	
01.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.181.670.395,00	1.146.429.449,00	(35.240.946,00)	97,02	
01.1.06.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	536.154.000,00	526.160.000,00	(9.994.000,00)	98,14	
01.1.06.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	536.154.000,00	526.160.000,00	(9.994.000,00)	98,14	
01.1.06.02.5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.400.000,00	491.000.000,00	(9.400.000,00)	98,12	
01.1.06.02.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.754.000,00	35.160.000,00	(594.000,00)	98,34	
01.1.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.828.239,00	98.219.449,00	(8.608.790,00)	91,94	
01.1.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.076.615,00	13.110.000,00	(1.966.615,00)	86,96	
01.1.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.361.525,00	2.160.000,00	(201.525,00)	91,47	
01.1.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.715.090,00	10.950.000,00	(1.765.090,00)	86,12	
01.1.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.846.924,00	74.359.449,00	(6.487.475,00)	91,98	
01.1.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	24.117.417,00	23.750.000,00	(367.417,00)	98,48	
01.1.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	56.729.507,00	50.609.449,00	(6.120.058,00)	89,21	
01.1.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.904.700,00	10.750.000,00	(154.700,00)	98,58	
01.1.06.02.5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.904.700,00	10.750.000,00	(154.700,00)	98,58	
01.1.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	58.042.984,00	56.950.000,00	(1.092.984,00)	98,12	
01.1.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	58.042.984,00	56.950.000,00	(1.092.984,00)	98,12	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	46.387.817,00	45.350.000,00	(1.037.817,00)	97,76	
01.1.06.02.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.655.167,00	11.600.000,00	(55.167,00)	99,53	
01.1.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	480.645.172,00	465.100.000,00	(15.545.172,00)	96,77	
01.1.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	402.766.626,00	397.400.000,00	(5.366.626,00)	98,67	
01.1.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	366.766.626,00	362.200.000,00	(4.566.626,00)	98,75	
01.1.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.000.000,00	35.200.000,00	(800.000,00)	97,78	
01.1.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.878.546,00	67.700.000,00	(10.178.546,00)	86,93	
01.1.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.442.296,00	11.100.000,00	(342.296,00)	97,01	
01.1.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	66.436.250,00	56.600.000,00	(9.836.250,00)	85,19	
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.998.978,00	19.947.300,00	(51.678,00)	99,74	
01.1.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.998.978,00	9.997.300,00	(1.678,00)	99,98	
01.1.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.978,00	9.997.300,00	(1.678,00)	99,98	
01.1.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.998.978,00	9.997.300,00	(1.678,00)	99,98	
01.1.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.998.978,00	9.997.300,00	(1.678,00)	99,98	
01.1.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.409.980,00	3.409.000,00	(980,00)	99,97	
01.1.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.588.998,00	1.588.300,00	(698,00)	99,96	
01.1.06.03.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
01.1.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
01.1.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
01.1.06.03.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
01.1.06.03.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.075.639,00	158.283.730,00	(6.791.909,00)	95,89	
01.1.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	153.168.205,00	146.768.730,00	(6.399.475,00)	95,82	
01.1.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.168.205,00	146.768.730,00	(6.399.475,00)	95,82	
01.1.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	153.168.205,00	146.768.730,00	(6.399.475,00)	95,82	
01.1.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	153.168.205,00	146.768.730,00	(6.399.475,00)	95,82	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.870.800,00	9.809.300,00	(61.500,00)	99,38	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.847.000,00	3.795.500,00	(51.500,00)	98,66	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.530.915,00	97.148.930,00	(5.381.985,00)	94,75	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.416.000,00	7.411.000,00	(5.000,00)	99,93	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.704.990,00	1.704.000,00	(990,00)	99,94	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.128.500,00	26.230.000,00	(898.500,00)	96,69	
01.1.06.05.5.2	BELANJA MODAL	11.907.434,00	11.515.000,00	(392.434,00)	96,70	
01.1.06.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.907.434,00	11.515.000,00	(392.434,00)	96,70	
01.1.06.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.917.434,00	1.915.000,00	(2.434,00)	99,87	
01.1.06.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.917.434,00	1.915.000,00	(2.434,00)	99,87	
01.1.06.05.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.917.434,00	1.915.000,00	(2.434,00)	99,87	
01.1.06.05.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.990.000,00	9.600.000,00	(390.000,00)	96,10	
01.1.06.05.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.990.000,00	9.600.000,00	(390.000,00)	96,10	
01.1.06.05.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.990.000,00	9.600.000,00	(390.000,00)	96,10	
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.686.000,00	385.808.520,00	(16.877.480,00)	95,81	
01.1.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	402.686.000,00	385.808.520,00	(16.877.480,00)	95,81	
01.1.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.686.000,00	385.808.520,00	(16.877.480,00)	95,81	
01.1.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.400.000,00	6.035.000,00	(2.365.000,00)	71,85	
01.1.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	6.035.000,00	(2.365.000,00)	71,85	
01.1.06.09.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.400.000,00	6.035.000,00	(2.365.000,00)	71,85	
01.1.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.886.000,00	356.373.520,00	(14.512.480,00)	96,09	
01.1.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.886.000,00	356.373.520,00	(14.512.480,00)	96,09	
01.1.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.886.000,00	356.373.520,00	(14.512.480,00)	96,09	
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.121.340.497,00	7.042.986.129,00	(78.354.368,00)	98,90	
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.200.000,00	35.150.000,00	(50.000,00)	99,86	
01.1.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.200.000,00	35.150.000,00	(50.000,00)	99,86	
01.1.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	35.150.000,00	(50.000,00)	99,86	
01.1.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.180.000,00	13.130.000,00	(50.000,00)	99,62	
01.1.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.180.000,00	13.130.000,00	(50.000,00)	99,62	
01.1.08.01.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.780.000,00	4.730.000,00	(50.000,00)	98,95	
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.925.234.956,00	3.893.351.979,00	(31.882.977,00)	99,19	
01.1.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.925.234.956,00	3.893.351.979,00	(31.882.977,00)	99,19	
01.1.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.907.834.956,00	3.875.951.979,00	(31.882.977,00)	99,18	
01.1.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.907.034.956,00	3.875.151.979,00	(31.882.977,00)	99,18	
01.1.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.907.034.956,00	3.875.151.979,00	(31.882.977,00)	99,18	
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	127.373.500,00	126.112.585,00	(1.260.915,00)	99,01	
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	60.463.650,00	60.393.000,00	(70.650,00)	99,88	
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.522.469.806,00	3.494.357.672,00	(28.112.134,00)	99,20	
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	194.978.000,00	192.538.722,00	(2.439.278,00)	98,75	
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.716.716,00	40.857.152,00	(859.564,00)	97,94	
01.1.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.259.126,00	37.257.152,00	(1.974,00)	99,99	
01.1.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.259.126,00	37.257.152,00	(1.974,00)	99,99	
01.1.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	37.259.126,00	37.257.152,00	(1.974,00)	99,99	
01.1.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.259.126,00	37.257.152,00	(1.974,00)	99,99	
01.1.08.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.694.500,00	9.694.500,00	0,00	100,00	
01.1.08.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.964.626,00	25.962.652,00	(1.974,00)	99,99	
01.1.08.03.5.2	BELANJA MODAL	4.457.590,00	3.600.000,00	(857.590,00)	80,76	
01.1.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.457.590,00	3.600.000,00	(857.590,00)	80,76	
01.1.08.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.457.590,00	3.600.000,00	(857.590,00)	80,76	
01.1.08.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.457.590,00	3.600.000,00	(857.590,00)	80,76	
01.1.08.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.457.590,00	3.600.000,00	(857.590,00)	80,76	
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.119.188.825,00	3.073.626.998,00	(45.561.827,00)	98,54	
01.1.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.081.188.825,00	3.038.176.998,00	(43.011.827,00)	98,60	
01.1.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.168.825,00	3.007.156.998,00	(43.011.827,00)	98,59	
01.1.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	28.368.825,00	28.368.000,00	(825,00)	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.368.825,00	28.368.000,00	(825,00)	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.838.825,00	2.838.000,00	(825,00)	99,97	
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.021.800.000,00	2.978.788.998,00	(43.011.002,00)	98,58	
01.1.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.985.800.000,00	2.946.700.000,00	(39.100.000,00)	98,69	
01.1.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.720.600.000,00	2.681.500.000,00	(39.100.000,00)	98,56	
01.1.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.1.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	36.000.000,00	32.088.998,00	(3.911.002,00)	89,14	
01.1.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.000.000,00	32.088.998,00	(3.911.002,00)	89,14	
01.1.08.04.5.2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	35.450.000,00	(2.550.000,00)	93,29	
01.1.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	35.450.000,00	(2.550.000,00)	93,29	
01.1.08.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38.000.000,00	35.450.000,00	(2.550.000,00)	93,29	
01.1.08.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	38.000.000,00	35.450.000,00	(2.550.000,00)	93,29	
01.1.08.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	17.900.000,00	(2.100.000,00)	89,50	
01.1.08.04.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18.000.000,00	17.550.000,00	(450.000,00)	97,50	
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.622.288.114,00	1.559.844.773,00	(62.443.341,00)	96,15	
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	736.148.310,00	691.274.513,00	(44.873.797,00)	93,90	
01.1.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	736.148.310,00	691.274.513,00	(44.873.797,00)	93,90	
01.1.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.148.310,00	691.274.513,00	(44.873.797,00)	93,90	
01.1.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	233.238.750,00	233.238.750,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	233.238.750,00	233.238.750,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	318.750,00	318.750,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	69.450.000,00	28.821.100,00	(40.628.900,00)	41,50	
01.1.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	69.450.000,00	28.821.100,00	(40.628.900,00)	41,50	
01.1.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	69.450.000,00	28.821.100,00	(40.628.900,00)	41,50	
01.1.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	433.459.560,00	429.214.663,00	(4.244.897,00)	99,02	
01.1.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	433.459.560,00	429.214.663,00	(4.244.897,00)	99,02	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	291.709.626,00	291.596.729,00	(112.897,00)	99,96	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	85.680.000,00	81.548.000,00	(4.132.000,00)	95,18	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	24.639.934,00	24.639.934,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	738.779.804,00	721.999.260,00	(16.780.544,00)	97,73	
01.1.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	720.935.137,00	704.406.260,00	(16.528.877,00)	97,71	
01.1.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.935.137,00	704.406.260,00	(16.528.877,00)	97,71	
01.1.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	177.896.147,00	177.882.317,00	(13.830,00)	99,99	
01.1.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	177.896.147,00	177.882.317,00	(13.830,00)	99,99	
01.1.09.06.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	104.125.550,00	104.111.900,00	(13.650,00)	99,99	
01.1.09.06.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.270.597,00	18.270.417,00	(180,00)	100,00	
01.1.09.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	96.583.500,00	(3.416.500,00)	96,58	
01.1.09.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	96.583.500,00	(3.416.500,00)	96,58	
01.1.09.06.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	100.000.000,00	96.583.500,00	(3.416.500,00)	96,58	
01.1.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	443.038.990,00	429.940.443,00	(13.098.547,00)	97,04	
01.1.09.06.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	91.730.790,00	91.121.384,00	(609.406,00)	99,34	
01.1.09.06.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	69.230.790,00	68.771.534,00	(459.256,00)	99,34	
01.1.09.06.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	22.500.000,00	22.349.850,00	(150.150,00)	99,33	
01.1.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.308.200,00	338.819.059,00	(12.489.141,00)	96,44	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	28.438.200,00	28.435.000,00	(3.200,00)	99,99	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	47.540.000,00	47.540.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.660.000,00	18.625.000,00	(35.000,00)	99,81	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	70.000.000,00	69.896.434,00	(103.566,00)	99,85	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	51.920.000,00	51.906.610,00	(13.390,00)	99,97	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.500.000,00	30.623.345,00	(11.876.655,00)	72,05	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	10.500.000,00	10.093.851,00	(406.149,00)	96,13	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.800.000,00	43.797.900,00	(2.100,00)	100,00	
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	37.950.000,00	37.900.919,00	(49.081,00)	99,87	
01.1.09.06.5.2	BELANJA MODAL	17.844.667,00	17.593.000,00	(251.667,00)	98,59	
01.1.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.844.667,00	17.593.000,00	(251.667,00)	98,59	
01.1.09.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.344.667,00	12.343.000,00	(1.667,00)	99,99	
01.1.09.06.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.344.667,00	12.343.000,00	(1.667,00)	99,99	
01.1.09.06.5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.871.667,00	3.870.000,00	(1.667,00)	99,96	
01.1.09.06.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.473.000,00	8.473.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
01.1.09.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
01.1.09.06.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	117.360.000,00	116.576.000,00	(784.000,00)	99,33	
01.1.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	117.360.000,00	116.576.000,00	(784.000,00)	99,33	
01.1.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.360.000,00	116.576.000,00	(784.000,00)	99,33	
01.1.09.07.5.1.02.01	Belanja Barang	88.740.000,00	87.956.000,00	(784.000,00)	99,12	
01.1.09.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.740.000,00	87.956.000,00	(784.000,00)	99,12	
01.1.09.07.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.450.000,00	61.700.000,00	(750.000,00)	98,80	
01.1.09.07.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.406.000,00	(34.000,00)	99,23	
01.1.09.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.07.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.1.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
01.1.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
01.1.09.11.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
01.1.09.11.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
01.1.09.11.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.151.465.999,00	4.615.299.345,00	(1.536.166.654,00)	75,03	
02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.332.266.600,00	3.824.668.794,00	(1.507.597.806,00)	71,73	
02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50.264.000,00	49.727.217,00	(536.783,00)	98,93	
02.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.264.000,00	49.727.217,00	(536.783,00)	98,93	
02.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.264.000,00	49.727.217,00	(536.783,00)	98,93	
02.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.436.000,00	16.436.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.436.000,00	16.436.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.236.000,00	16.236.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.100.000,00	(400.000,00)	94,67	
02.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.100.000,00	(400.000,00)	94,67	
02.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.100.000,00	(400.000,00)	94,67	
02.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.328.000,00	26.191.217,00	(136.783,00)	99,48	
02.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.328.000,00	26.191.217,00	(136.783,00)	99,48	
02.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.328.000,00	26.191.217,00	(136.783,00)	99,48	
02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4.256.954.600,00	3.141.413.434,00	(1.115.541.166,00)	73,79	
02.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.148.821.766,00	1.041.799.434,00	(107.022.332,00)	90,68	
02.1.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.471.766,00	1.035.449.434,00	(107.022.332,00)	90,63	
02.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	288.484.566,00	284.468.566,00	(4.016.000,00)	98,61	
02.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	288.484.566,00	284.468.566,00	(4.016.000,00)	98,61	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	175.000.000,00	174.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.919.166,00	2.919.166,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	64.400,00	64.400,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.786.000,00	12.270.000,00	(3.516.000,00)	77,73	
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	448.000.000,00	376.271.000,00	(71.729.000,00)	83,99	
02.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	245.000.000,00	173.271.000,00	(71.729.000,00)	70,72	
02.1.01.02.5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	98.790.000,00	(1.210.000,00)	98,79	
02.1.01.02.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	75.000.000,00	74.481.000,00	(519.000,00)	99,31	
02.1.01.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0	
02.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	405.987.200,00	374.709.868,00	(31.277.332,00)	92,30	
02.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	405.987.200,00	374.709.868,00	(31.277.332,00)	92,30	
02.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400.287.200,00	369.009.868,00	(31.277.332,00)	92,19	
02.1.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.108.132.834,00	2.099.614.000,00	(1.008.518.834,00)	67,55	
02.1.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.128.132.834,00	2.099.614.000,00	(28.518.834,00)	98,66	
02.1.01.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	750.000.000,00	733.425.000,00	(16.575.000,00)	97,79	
02.1.01.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	750.000.000,00	733.425.000,00	(16.575.000,00)	97,79	
02.1.01.02.5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	750.000.000,00	733.425.000,00	(16.575.000,00)	97,79	
02.1.01.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.228.132.834,00	1.217.239.000,00	(10.893.834,00)	99,11	
02.1.01.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	28.132.834,00	27.660.000,00	(472.834,00)	98,32	
02.1.01.02.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.132.834,00	27.660.000,00	(472.834,00)	98,32	
02.1.01.02.5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.200.000.000,00	1.189.579.000,00	(10.421.000,00)	99,13	
02.1.01.02.5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.200.000.000,00	1.189.579.000,00	(10.421.000,00)	99,13	
02.1.01.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	150.000.000,00	148.950.000,00	(1.050.000,00)	99,30	
02.1.01.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	150.000.000,00	148.950.000,00	(1.050.000,00)	99,30	
02.1.01.02.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	150.000.000,00	148.950.000,00	(1.050.000,00)	99,30	
02.1.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	980.000.000,00	0,00	(980.000.000,00)	0	
02.1.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	980.000.000,00	0,00	(980.000.000,00)	0	
02.1.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	980.000.000,00	0,00	(980.000.000,00)	0	
02.1.01.02.5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	980.000.000,00	0,00	(980.000.000,00)	0	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	960.650.000,00	569.730.143,00	(390.919.857,00)	59,31	
02.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	960.650.000,00	569.730.143,00	(390.919.857,00)	59,31	
02.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.650.000,00	569.730.143,00	(390.919.857,00)	59,31	
02.1.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	863.294.000,00	473.147.000,00	(390.147.000,00)	54,81	
02.1.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	863.294.000,00	473.147.000,00	(390.147.000,00)	54,81	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	822.748.000,00	440.188.500,00	(382.559.500,00)	53,50	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.650.000,00	7.612.500,00	(37.500,00)	99,51	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.660.000,00	1.110.000,00	(550.000,00)	66,87	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.236.000,00	16.236.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00	
02.1.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
02.1.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
02.1.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
02.1.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	89.856.000,00	89.383.143,00	(472.857,00)	99,47	
02.1.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.856.000,00	89.383.143,00	(472.857,00)	99,47	
02.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.856.000,00	89.383.143,00	(472.857,00)	99,47	
02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	64.398.000,00	63.798.000,00	(600.000,00)	99,07	
02.1.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.398.000,00	63.798.000,00	(600.000,00)	99,07	
02.1.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.398.000,00	63.798.000,00	(600.000,00)	99,07	
02.1.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.730.000,00	28.130.000,00	(600.000,00)	97,91	
02.1.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.730.000,00	28.130.000,00	(600.000,00)	97,91	
02.1.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.730.000,00	28.130.000,00	(600.000,00)	97,91	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.01.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.01.04.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	189.649.000,00	188.274.972,00	(1.374.028,00)	99,28	
02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	95.400.000,00	94.440.000,00	(960.000,00)	98,99	
02.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.400.000,00	94.440.000,00	(960.000,00)	98,99	
02.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	94.440.000,00	(960.000,00)	98,99	
02.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.550.000,00	57.050.000,00	(500.000,00)	99,13	
02.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.550.000,00	57.050.000,00	(500.000,00)	99,13	
02.1.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33	
02.1.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	50.050.000,00	50.050.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.690.000,00	30.230.000,00	(460.000,00)	98,50	
02.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.690.000,00	30.230.000,00	(460.000,00)	98,50	
02.1.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.440.000,00	26.980.000,00	(460.000,00)	98,32	
02.1.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	19.436.000,00	19.340.831,00	(95.169,00)	99,51	
02.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.436.000,00	19.340.831,00	(95.169,00)	99,51	
02.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.436.000,00	19.340.831,00	(95.169,00)	99,51	
02.1.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
02.1.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.886.000,00	18.790.831,00	(95.169,00)	99,50	
02.1.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.886.000,00	18.790.831,00	(95.169,00)	99,50	
02.1.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.886.000,00	18.790.831,00	(95.169,00)	99,50	
02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	74.813.000,00	74.494.141,00	(318.859,00)	99,57	
02.1.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	74.813.000,00	74.494.141,00	(318.859,00)	99,57	
02.1.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.813.000,00	74.494.141,00	(318.859,00)	99,57	
02.1.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	50.220.000,00	50.199.500,00	(20.500,00)	99,96	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.220.000,00	50.199.500,00	(20.500,00)	99,96	
02.1.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.220.000,00	50.199.500,00	(20.500,00)	99,96	
02.1.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.593.000,00	24.294.641,00	(298.359,00)	98,79	
02.1.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.593.000,00	24.294.641,00	(298.359,00)	98,79	
02.1.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.593.000,00	24.294.641,00	(298.359,00)	98,79	
02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	629.550.399,00	602.355.579,00	(27.194.820,00)	95,68	
02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	185.365.000,00	177.569.317,00	(7.795.683,00)	95,79	
02.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	185.365.000,00	177.569.317,00	(7.795.683,00)	95,79	
02.1.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.415.000,00	168.619.317,00	(7.795.683,00)	95,58	
02.1.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.499.000,00	13.489.000,00	(10.000,00)	99,93	
02.1.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.499.000,00	13.489.000,00	(10.000,00)	99,93	
02.1.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	459.000,00	459.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	7.840.000,00	7.830.000,00	(10.000,00)	99,87	
02.1.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	118.316.000,00	110.530.317,00	(7.785.683,00)	93,42	
02.1.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.316.000,00	110.530.317,00	(7.785.683,00)	93,42	
02.1.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.500.000,00	54.714.317,00	(7.785.683,00)	87,54	
02.1.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.136.000,00	45.136.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	209.368.000,00	197.658.922,00	(11.709.078,00)	94,41	
02.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	209.368.000,00	197.658.922,00	(11.709.078,00)	94,41	
02.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.368.000,00	197.658.922,00	(11.709.078,00)	94,41	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	33.222.000,00	32.280.000,00	(942.000,00)	97,16	
02.1.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.222.000,00	32.280.000,00	(942.000,00)	97,16	
02.1.03.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.394.000,00	750.000,00	(644.000,00)	53,80	
02.1.03.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.350.000,00	10.080.000,00	(270.000,00)	97,39	
02.1.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.728.000,00	7.700.000,00	(28.000,00)	99,64	
02.1.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.850.000,00	81.850.000,00	(3.000.000,00)	96,46	
02.1.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.200.000,00	60.200.000,00	(3.000.000,00)	95,25	
02.1.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.900.000,00	42.900.000,00	(3.000.000,00)	93,46	
02.1.03.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	91.296.000,00	83.528.922,00	(7.767.078,00)	91,49	
02.1.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.296.000,00	83.528.922,00	(7.767.078,00)	91,49	
02.1.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.424.000,00	59.708.922,00	(7.715.078,00)	88,56	
02.1.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.272.000,00	20.220.000,00	(52.000,00)	99,74	
02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	229.817.399,00	222.127.340,00	(7.690.059,00)	96,65	
02.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	224.991.899,00	218.501.840,00	(6.490.059,00)	97,12	
02.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.991.899,00	218.501.840,00	(6.490.059,00)	97,12	
02.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.819.899,00	3.819.800,00	(99,00)	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.819.899,00	3.819.800,00	(99,00)	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	338.000,00	338.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.225.899,00	1.225.800,00	(99,00)	99,99	
02.1.03.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	170.550.000,00	168.300.000,00	(2.250.000,00)	98,68	
02.1.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.300.000,00	143.300.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.1.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.250.000,00	25.000.000,00	(2.250.000,00)	91,74	
02.1.03.03.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	27.250.000,00	25.000.000,00	(2.250.000,00)	91,74	
02.1.03.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	6.338.550,00	(1.661.450,00)	79,23	
02.1.03.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	6.338.550,00	(1.661.450,00)	79,23	
02.1.03.03.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8.000.000,00	6.338.550,00	(1.661.450,00)	79,23	
02.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.622.000,00	40.043.490,00	(2.578.510,00)	93,95	
02.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.622.000,00	40.043.490,00	(2.578.510,00)	93,95	
02.1.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.622.000,00	40.043.490,00	(2.578.510,00)	93,95	
02.1.03.03.5.2	BELANJA MODAL	4.825.500,00	3.625.500,00	(1.200.000,00)	75,13	
02.1.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.825.500,00	3.625.500,00	(1.200.000,00)	75,13	
02.1.03.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.1.03.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.1.03.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.1.03.03.5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00	100,00	
02.1.03.03.5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00	100,00	
02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.1.03.04.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39.736.180.539,00	37.484.514.215,00	(2.251.666.324,00)	94,33	
03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	19.355.148.651,00	17.765.605.795,00	(1.589.542.856,00)	91,79	
03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	853.551.800,00	729.646.150,00	(123.905.650,00)	85,48	
03.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	853.551.800,00	729.646.150,00	(123.905.650,00)	85,48	
03.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.087.400,00	692.489.800,00	(78.597.600,00)	89,81	
03.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	87.704.400,00	77.529.800,00	(10.174.600,00)	88,40	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.704.400,00	77.529.800,00	(10.174.600,00)	88,40	
03.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.704.900,00	14.692.300,00	(12.600,00)	99,91	
03.1.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	66,67	
03.1.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	100,00	
03.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.412.000,00	60.700.000,00	(9.712.000,00)	86,21	
03.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	582.260.000,00	526.700.000,00	(55.560.000,00)	90,46	
03.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	582.260.000,00	526.700.000,00	(55.560.000,00)	90,46	
03.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	557.160.000,00	501.600.000,00	(55.560.000,00)	90,03	
03.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	101.123.000,00	88.260.000,00	(12.863.000,00)	87,28	
03.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.123.000,00	88.260.000,00	(12.863.000,00)	87,28	
03.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.370.000,00	74.220.000,00	(1.150.000,00)	98,47	
03.1.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.753.000,00	14.040.000,00	(11.713.000,00)	54,52	
03.1.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	82.464.400,00	37.156.350,00	(45.308.050,00)	45,06	
03.1.01.01.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	82.464.400,00	37.156.350,00	(45.308.050,00)	45,06	
03.1.01.01.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	82.464.400,00	37.156.350,00	(45.308.050,00)	45,06	
03.1.01.01.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	82.464.400,00	37.156.350,00	(45.308.050,00)	45,06	
03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	997.389.676,00	932.215.275,00	(65.174.401,00)	93,47	
03.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	877.921.789,00	816.860.275,00	(61.061.514,00)	93,04	
03.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.921.789,00	816.860.275,00	(61.061.514,00)	93,04	
03.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	302.696.989,00	297.172.106,00	(5.524.883,00)	98,17	
03.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	302.696.989,00	297.172.106,00	(5.524.883,00)	98,17	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.700.000,00	26.692.500,00	(7.500,00)	99,97	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.882.518,00	13.881.084,00	(1.434,00)	99,99	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.496.500,00	3.495.000,00	(1.500,00)	99,96	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.480.056,00	21.226.276,00	(253.780,00)	98,82	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	649.225,00	649.225,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.912.731,00	1.912.731,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.045.830,00	6.882.500,00	(163.330,00)	97,68	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.777.792,00	37.665.000,00	(112.792,00)	99,70	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.648.600,00	35.100.000,00	(548.600,00)	98,46	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.403.252,00	9.395.305,00	(7.947,00)	99,92	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.680.485,00	4.680.485,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.200.000,00	69.172.000,00	(28.000,00)	99,96	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.820.000,00	39.422.200,00	(10.397.800,00)	79,13	
03.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.820.000,00	39.422.200,00	(7.397.800,00)	84,20	
03.1.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.200.000,00	28.200.000,00	(4.000.000,00)	87,58	
03.1.01.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	4.540.000,00	(1.460.000,00)	75,67	
03.1.01.02.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.020.000,00	2.082.200,00	(1.937.800,00)	51,80	
03.1.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
03.1.01.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
03.1.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	117.760.000,00	117.245.000,00	(515.000,00)	99,56	
03.1.01.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	88.800.000,00	88.300.000,00	(500.000,00)	99,44	
03.1.01.02.5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	88.800.000,00	88.300.000,00	(500.000,00)	99,44	
03.1.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.960.000,00	28.945.000,00	(15.000,00)	99,95	
03.1.01.02.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.960.000,00	20.945.000,00	(15.000,00)	99,93	
03.1.01.02.5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	407.644.800,00	363.020.969,00	(44.623.831,00)	89,05	
03.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	407.644.800,00	363.020.969,00	(44.623.831,00)	89,05	
03.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	376.701.800,00	337.377.969,00	(39.323.831,00)	89,56	
03.1.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.643.000,00	25.643.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	0	
03.1.01.02.5.2	BELANJA MODAL	119.467.887,00	115.355.000,00	(4.112.887,00)	96,56	
03.1.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.467.887,00	115.355.000,00	(4.112.887,00)	96,56	
03.1.01.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	31.468.500,00	29.900.000,00	(1.568.500,00)	95,02	
03.1.01.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	31.468.500,00	29.900.000,00	(1.568.500,00)	95,02	
03.1.01.02.5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	31.468.500,00	29.900.000,00	(1.568.500,00)	95,02	
03.1.01.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	40.073.220,00	39.200.000,00	(873.220,00)	97,82	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.01.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	40.073.220,00	39.200.000,00	(873.220,00)	97,82	
03.1.01.02.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.073.220,00	39.200.000,00	(873.220,00)	97,82	
03.1.01.02.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
03.1.01.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.655.167,00	11.600.000,00	(55.167,00)	99,53	
03.1.01.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.655.167,00	11.600.000,00	(55.167,00)	99,53	
03.1.01.02.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.655.167,00	11.600.000,00	(55.167,00)	99,53	
03.1.01.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	33.966.000,00	32.350.000,00	(1.616.000,00)	95,24	
03.1.01.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.316.000,00	17.250.000,00	(66.000,00)	99,62	
03.1.01.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.316.000,00	17.250.000,00	(66.000,00)	99,62	
03.1.01.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.650.000,00	15.100.000,00	(1.550.000,00)	90,69	
03.1.01.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.650.000,00	15.100.000,00	(1.550.000,00)	90,69	
03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	17.504.207.175,00	16.103.744.370,00	(1.400.462.805,00)	92,00	
03.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.504.207.175,00	16.103.744.370,00	(1.400.462.805,00)	92,00	
03.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.048.250,00	491.546.370,00	(68.501.880,00)	87,77	
03.1.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	15.956.250,00	13.250.000,00	(2.706.250,00)	83,04	
03.1.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.956.250,00	13.250.000,00	(2.706.250,00)	83,04	
03.1.01.03.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.956.250,00	13.250.000,00	(2.706.250,00)	83,04	
03.1.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	14.985.000,00	(15.015.000,00)	49,95	
03.1.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000,00	14.985.000,00	(15.015.000,00)	49,95	
03.1.01.03.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
03.1.01.03.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
03.1.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	514.092.000,00	463.311.370,00	(50.780.630,00)	90,12	
03.1.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	514.092.000,00	463.311.370,00	(50.780.630,00)	90,12	
03.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	514.092.000,00	463.311.370,00	(50.780.630,00)	90,12	
03.1.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.944.158.925,00	15.612.198.000,00	(1.331.960.925,00)	92,14	
03.1.01.03.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	16.944.158.925,00	15.612.198.000,00	(1.331.960.925,00)	92,14	
03.1.01.03.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	16.944.158.925,00	15.612.198.000,00	(1.331.960.925,00)	92,14	
03.1.01.03.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	16.944.158.925,00	15.612.198.000,00	(1.331.960.925,00)	92,14	
03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	526.113.600,00	421.054.699,00	(105.058.901,00)	80,03	
03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	526.113.600,00	421.054.699,00	(105.058.901,00)	80,03	
03.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	526.113.600,00	421.054.699,00	(105.058.901,00)	80,03	
03.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.113.600,00	421.054.699,00	(105.058.901,00)	80,03	
03.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	38.151.600,00	18.475.000,00	(19.676.600,00)	48,43	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.151.600,00	18.475.000,00	(19.676.600,00)	48,43	
03.1.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.175.600,00	0,00	(2.175.600,00)	0	
03.1.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
03.1.03.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0	
03.1.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.876.000,00	18.475.000,00	(14.401.000,00)	56,20	
03.1.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	258.600.000,00	249.400.000,00	(9.200.000,00)	96,44	
03.1.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	258.600.000,00	249.400.000,00	(9.200.000,00)	96,44	
03.1.03.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,43	
03.1.03.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	237.600.000,00	234.400.000,00	(3.200.000,00)	98,65	
03.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	229.362.000,00	153.179.699,00	(76.182.301,00)	66,79	
03.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	229.362.000,00	153.179.699,00	(76.182.301,00)	66,79	
03.1.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229.362.000,00	153.179.699,00	(76.182.301,00)	66,79	
03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	19.854.918.288,00	19.297.853.721,00	(557.064.567,00)	97,19	
03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	19.589.025.824,00	19.038.857.271,00	(550.168.553,00)	97,19	
03.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.709.853.131,00	2.550.307.918,00	(159.545.213,00)	94,11	
03.1.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.696.253.131,00	2.536.707.918,00	(159.545.213,00)	94,08	
03.1.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	475.265.853,00	467.538.972,00	(7.726.881,00)	98,37	
03.1.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	475.265.853,00	467.538.972,00	(7.726.881,00)	98,37	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	243.792.000,00	240.452.800,00	(3.339.200,00)	98,63	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.842.178,00	7.841.000,00	(1.178,00)	99,98	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	171.729.750,00	171.247.950,00	(481.800,00)	99,72	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	268.065,00	268.065,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.580.807,00	1.580.407,00	(400,00)	99,97	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.261.058,00	1.016.000,00	(245.058,00)	80,57	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.800.000,00	16.700.000,00	(100.000,00)	99,40	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.614.745,00	19.558.000,00	(56.745,00)	99,71	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.320.000,00	6.820.000,00	(3.500.000,00)	66,09	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.637.250,00	1.634.750,00	(2.500,00)	99,85	
03.1.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.688.441.500,00	1.614.403.146,00	(74.038.354,00)	95,61	
03.1.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.441.500,00	76.286.375,00	(3.155.125,00)	96,03	
03.1.06.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	71.100.000,00	68.550.000,00	(2.550.000,00)	96,41	
03.1.06.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.831.500,00	1.830.600,00	(900,00)	99,95	
03.1.06.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.510.000,00	5.905.775,00	(604.225,00)	90,72	
03.1.06.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.605.000.000,00	1.534.116.771,00	(70.883.229,00)	95,58	
03.1.06.02.5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.070.000.000,00	1.001.993.116,00	(68.006.884,00)	93,64	
03.1.06.02.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	99,80	
03.1.06.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	335.000.000,00	332.423.655,00	(2.576.345,00)	99,23	
03.1.06.02.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
03.1.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	254.690.578,00	254.658.000,00	(32.578,00)	99,99	
03.1.06.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	70.101.278,00	70.100.000,00	(1.278,00)	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	70.101.278,00	70.100.000,00	(1.278,00)	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.589.300,00	69.558.500,00	(30.800,00)	99,96	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	15.961.800,00	15.960.000,00	(1.800,00)	99,99	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.440.000,00	4.438.500,00	(1.500,00)	99,97	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.387.500,00	1.385.000,00	(2.500,00)	99,82	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,00	5.575.000,00	(25.000,00)	99,55	
03.1.06.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	115.000.000,00	114.999.500,00	(500,00)	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	115.000.000,00	114.999.500,00	(500,00)	100,00	
03.1.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	277.855.200,00	200.107.800,00	(77.747.400,00)	72,02	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	277.855.200,00	200.107.800,00	(77.747.400,00)	72,02	
03.1.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	277.855.200,00	200.107.800,00	(77.747.400,00)	72,02	
03.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	16.879.172.693,00	16.488.549.353,00	(390.623.340,00)	97,69	
03.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.190.693,00	197.715.000,00	(2.475.693,00)	98,76	
03.1.06.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.190.000,00	32.000.000,00	(190.000,00)	99,41	
03.1.06.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.190.000,00	32.000.000,00	(190.000,00)	99,41	
03.1.06.02.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.190.000,00	32.000.000,00	(190.000,00)	99,41	
03.1.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.009.318,00	35.415.000,00	(594.318,00)	98,35	
03.1.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.437.025,00	27.125.000,00	(312.025,00)	98,86	
03.1.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	27.437.025,00	27.125.000,00	(312.025,00)	98,86	
03.1.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.572.293,00	8.290.000,00	(282.293,00)	96,71	
03.1.06.02.5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.297.550,00	4.290.000,00	(7.550,00)	99,82	
03.1.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.274.743,00	4.000.000,00	(274.743,00)	93,57	
03.1.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	131.991.375,00	130.300.000,00	(1.691.375,00)	98,72	
03.1.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	117.611.375,00	116.100.000,00	(1.511.375,00)	98,71	
03.1.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	110.736.375,00	110.600.000,00	(136.375,00)	99,88	
03.1.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.875.000,00	5.500.000,00	(1.375.000,00)	80,00	
03.1.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.380.000,00	14.200.000,00	(180.000,00)	98,75	
03.1.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.380.000,00	14.200.000,00	(180.000,00)	98,75	
03.1.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.678.982.000,00	16.290.834.353,00	(388.147.647,00)	97,67	
03.1.06.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.678.982.000,00	16.290.834.353,00	(388.147.647,00)	97,67	
03.1.06.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.678.982.000,00	16.290.834.353,00	(388.147.647,00)	97,67	
03.1.06.02.5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	16.678.982.000,00	16.290.834.353,00	(388.147.647,00)	97,67	
03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	265.892.464,00	258.996.450,00	(6.896.014,00)	97,41	
03.1.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	176.891.411,00	174.396.450,00	(2.494.961,00)	98,59	
03.1.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.891.411,00	174.396.450,00	(2.494.961,00)	98,59	
03.1.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	90.115.611,00	89.932.950,00	(182.661,00)	99,80	
03.1.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.115.611,00	89.932.950,00	(182.661,00)	99,80	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.728.761,00	3.700.000,00	(28.761,00)	99,23	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	22.415.000,00	(85.000,00)	99,62	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	906.500,00	906.500,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.982.550,00	3.982.450,00	(100,00)	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.962.800,00	10.940.000,00	(22.800,00)	99,79	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
03.1.06.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.735.000,00	19.704.000,00	(31.000,00)	99,84	
03.1.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.380.000,00	24.338.500,00	(41.500,00)	99,83	
03.1.06.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.380.000,00	24.338.500,00	(41.500,00)	99,83	
03.1.06.03.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.380.000,00	14.338.500,00	(41.500,00)	99,71	
03.1.06.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.820.800,00	36.550.000,00	(2.270.800,00)	94,15	
03.1.06.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.820.800,00	36.550.000,00	(2.270.800,00)	94,15	
03.1.06.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.820.800,00	36.550.000,00	(2.270.800,00)	94,15	
03.1.06.03.5.2	BELANJA MODAL	89.001.053,00	84.600.000,00	(4.401.053,00)	95,06	
03.1.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.001.053,00	84.600.000,00	(4.401.053,00)	95,06	
03.1.06.03.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
03.1.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.212.450,00	3.900.000,00	(312.450,00)	92,58	
03.1.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.212.450,00	3.900.000,00	(312.450,00)	92,58	
03.1.06.03.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.212.450,00	3.900.000,00	(312.450,00)	92,58	
03.1.06.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.788.603,00	48.700.000,00	(4.088.603,00)	92,25	
03.1.06.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	48.846.549,00	48.700.000,00	(146.549,00)	99,70	
03.1.06.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	48.846.549,00	48.700.000,00	(146.549,00)	99,70	
03.1.06.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.942.054,00	0,00	(3.942.054,00)	0	
03.1.06.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.942.054,00	0,00	(3.942.054,00)	0	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.883.057.928,00	10.223.352.683,00	(659.705.245,00)	93,94	
04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.362.003.056,00	1.323.207.629,00	(38.795.427,00)	97,15	
04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	658.388.000,00	630.514.344,00	(27.873.656,00)	95,77	
04.1.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	658.388.000,00	630.514.344,00	(27.873.656,00)	95,77	
04.1.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.1.05.01.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.438.000,00	616.564.344,00	(27.873.656,00)	95,67	
04.1.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	102.782.000,00	101.242.925,00	(1.539.075,00)	98,50	
04.1.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.782.000,00	101.242.925,00	(1.539.075,00)	98,50	
04.1.05.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.032.000,00	78.417.000,00	(615.000,00)	99,22	
04.1.05.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	4.075.925,00	(924.075,00)	81,52	
04.1.05.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	512.040.000,00	489.100.000,00	(22.940.000,00)	95,52	
04.1.05.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	512.040.000,00	489.100.000,00	(22.940.000,00)	95,52	
04.1.05.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	213.840.000,00	213.300.000,00	(540.000,00)	99,75	
04.1.05.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	298.200.000,00	275.800.000,00	(22.400.000,00)	92,49	
04.1.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.616.000,00	26.221.419,00	(3.394.581,00)	88,54	
04.1.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.616.000,00	26.221.419,00	(3.394.581,00)	88,54	
04.1.05.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.616.000,00	26.221.419,00	(3.394.581,00)	88,54	
04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	703.615.056,00	692.693.285,00	(10.921.771,00)	98,45	
04.1.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	703.615.056,00	692.693.285,00	(10.921.771,00)	98,45	
04.1.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.531.875,00	86.999.875,00	(5.532.000,00)	94,02	
04.1.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	21.972.375,00	21.972.375,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.972.375,00	21.972.375,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	353.375,00	353.375,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.207.500,00	20.207.500,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.807.500,00	5.807.500,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.557.500,00	5.557.500,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.352.000,00	44.820.000,00	(5.532.000,00)	89,01	
04.1.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.352.000,00	44.820.000,00	(5.532.000,00)	89,01	
04.1.05.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.752.000,00	27.220.000,00	(5.532.000,00)	83,11	
04.1.05.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
04.1.05.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	611.083.181,00	605.693.410,00	(5.389.771,00)	99,12	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.1.05.02.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	611.083.181,00	605.693.410,00	(5.389.771,00)	99,12	
04.1.05.02.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	611.083.181,00	605.693.410,00	(5.389.771,00)	99,12	
04.1.05.02.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	611.083.181,00	605.693.410,00	(5.389.771,00)	99,12	
04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	9.521.054.872,00	8.900.145.054,00	(620.909.818,00)	93,48	
04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.799.095.122,00	3.547.734.092,00	(251.361.030,00)	93,38	
04.1.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.663.068.522,00	2.419.399.092,00	(243.669.430,00)	90,85	
04.1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.698.825,00	819.033.157,00	(72.665.668,00)	91,85	
04.1.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	273.562.825,00	268.437.225,00	(5.125.600,00)	98,13	
04.1.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.781.225,00	207.757.225,00	(3.024.000,00)	98,57	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.500.000,00	72.000.000,00	(1.500.000,00)	97,96	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	114.044.000,00	113.000.000,00	(1.044.000,00)	99,08	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.132.800,00	4.132.800,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	546.000,00	546.000,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	318.300,00	318.300,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	290.125,00	290.125,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.020.000,00	(480.000,00)	97,26	
04.1.06.01.5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	62.781.600,00	60.680.000,00	(2.101.600,00)	96,65	
04.1.06.01.5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	62.781.600,00	60.680.000,00	(2.101.600,00)	96,65	
04.1.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	124.400.000,00	121.093.250,00	(3.306.750,00)	97,34	
04.1.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	11.700.000,00	(2.700.000,00)	81,25	
04.1.06.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	11.700.000,00	(2.700.000,00)	81,25	
04.1.06.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	110.000.000,00	109.393.250,00	(606.750,00)	99,45	
04.1.06.01.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000,00	69.680.250,00	(319.750,00)	99,54	
04.1.06.01.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.000.000,00	39.713.000,00	(287.000,00)	99,28	
04.1.06.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
04.1.06.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
04.1.06.01.5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
04.1.06.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	488.936.000,00	425.002.682,00	(63.933.318,00)	86,92	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.1.06.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	488.936.000,00	425.002.682,00	(63.933.318,00)	86,92	
04.1.06.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	479.436.000,00	415.502.682,00	(63.933.318,00)	86,66	
04.1.06.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
04.1.06.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.771.369.697,00	1.600.365.935,00	(171.003.762,00)	90,35	
04.1.06.01.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.771.369.697,00	1.600.365.935,00	(171.003.762,00)	90,35	
04.1.06.01.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.771.369.697,00	1.600.365.935,00	(171.003.762,00)	90,35	
04.1.06.01.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.771.369.697,00	1.600.365.935,00	(171.003.762,00)	90,35	
04.1.06.01.5.2	BELANJA MODAL	1.136.026.600,00	1.128.335.000,00	(7.691.600,00)	99,32	
04.1.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.026.600,00	135.600.000,00	(426.600,00)	99,69	
04.1.06.01.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	40.026.600,00	39.800.000,00	(226.600,00)	99,43	
04.1.06.01.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	40.026.600,00	39.800.000,00	(226.600,00)	99,43	
04.1.06.01.5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	21.822.600,00	21.700.000,00	(122.600,00)	99,44	
04.1.06.01.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	18.204.000,00	18.100.000,00	(104.000,00)	99,43	
04.1.06.01.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	96.000.000,00	95.800.000,00	(200.000,00)	99,79	
04.1.06.01.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	96.000.000,00	95.800.000,00	(200.000,00)	99,79	
04.1.06.01.5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	96.000.000,00	95.800.000,00	(200.000,00)	99,79	
04.1.06.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	992.735.000,00	(7.265.000,00)	99,27	
04.1.06.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	600.000.000,00	594.680.000,00	(5.320.000,00)	99,11	
04.1.06.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	196.943.000,00	(3.057.000,00)	98,47	
04.1.06.01.5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	200.000.000,00	196.943.000,00	(3.057.000,00)	98,47	
04.1.06.01.5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	397.737.000,00	(2.263.000,00)	99,43	
04.1.06.01.5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	400.000.000,00	397.737.000,00	(2.263.000,00)	99,43	
04.1.06.01.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400.000.000,00	398.055.000,00	(1.945.000,00)	99,51	
04.1.06.01.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400.000.000,00	398.055.000,00	(1.945.000,00)	99,51	
04.1.06.01.5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	400.000.000,00	398.055.000,00	(1.945.000,00)	99,51	
04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.721.959.750,00	5.352.410.962,00	(369.548.788,00)	93,54	
04.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.819.098.800,00	1.777.246.400,00	(41.852.400,00)	97,70	
04.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.098.800,00	1.777.246.400,00	(41.852.400,00)	97,70	
04.1.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.606.578.800,00	1.570.582.500,00	(35.996.300,00)	97,76	
04.1.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.606.578.800,00	1.570.582.500,00	(35.996.300,00)	97,76	
04.1.06.02.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
04.1.06.02.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	362.722.000,00	351.760.000,00	(10.962.000,00)	96,98	
04.1.06.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.456.800,00	29.577.500,00	(879.300,00)	97,11	
04.1.06.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.208.600.000,00	1.184.445.000,00	(24.155.000,00)	98,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.1.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	175.000.000,00	169.818.900,00	(5.181.100,00)	97,04	
04.1.06.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	175.000.000,00	169.818.900,00	(5.181.100,00)	97,04	
04.1.06.02.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	75.000.000,00	74.680.800,00	(319.200,00)	99,57	
04.1.06.02.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	100.000.000,00	95.138.100,00	(4.861.900,00)	95,14	
04.1.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.520.000,00	36.845.000,00	(675.000,00)	98,20	
04.1.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.520.000,00	36.845.000,00	(675.000,00)	98,20	
04.1.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.520.000,00	36.845.000,00	(675.000,00)	98,20	
04.1.06.02.5.2	BELANJA MODAL	3.902.860.950,00	3.575.164.562,00	(327.696.388,00)	91,60	
04.1.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.380.950,00	2.350.000,00	(30.950,00)	98,70	
04.1.06.02.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.380.950,00	2.350.000,00	(30.950,00)	98,70	
04.1.06.02.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.380.950,00	2.350.000,00	(30.950,00)	98,70	
04.1.06.02.5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	2.380.950,00	2.350.000,00	(30.950,00)	98,70	
04.1.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.720.000.000,00	2.628.432.145,00	(91.567.855,00)	96,63	
04.1.06.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.520.000.000,00	2.468.432.413,00	(51.567.587,00)	97,95	
04.1.06.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.520.000.000,00	2.468.432.413,00	(51.567.587,00)	97,95	
04.1.06.02.5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	2.520.000.000,00	2.468.432.413,00	(51.567.587,00)	97,95	
04.1.06.02.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	159.999.732,00	(40.000.268,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	159.999.732,00	(40.000.268,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	159.999.732,00	(40.000.268,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.180.480.000,00	944.382.417,00	(236.097.583,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.180.480.000,00	944.382.417,00	(236.097.583,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.180.480.000,00	944.382.417,00	(236.097.583,00)	80,00	
04.1.06.02.5.2.04.03.02.0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian	1.180.480.000,00	944.382.417,00	(236.097.583,00)	80,00	
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.123.330.350,00	4.915.851.599,00	(207.478.751,00)	95,95	
05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	4.950.210.350,00	4.742.836.599,00	(207.373.751,00)	95,81	
05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3.193.114.650,00	2.995.996.101,00	(197.118.549,00)	93,83	
05.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	793.114.650,00	780.864.561,00	(12.250.089,00)	98,46	
05.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.114.650,00	780.864.561,00	(12.250.089,00)	98,46	
05.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	132.892.650,00	124.747.500,00	(8.145.150,00)	93,87	
05.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	132.892.650,00	124.747.500,00	(8.145.150,00)	93,87	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.659.650,00	1.657.500,00	(2.150,00)	99,87	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.488.000,00	72.450.000,00	(38.000,00)	99,95	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.015.000,00	14.860.000,00	(2.155.000,00)	87,33	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	630.000,00	240.000,00	(390.000,00)	38,10	
05.1.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.160.000,00	1.600.000,00	(5.560.000,00)	22,35	
05.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	331.900.000,00	329.929.500,00	(1.970.500,00)	99,41	
05.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	205.900.000,00	204.800.000,00	(1.100.000,00)	99,47	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	90.000.000,00	89.129.500,00	(870.500,00)	99,03	
05.1.01.01.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
05.1.01.01.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	60.000.000,00	59.329.500,00	(670.500,00)	98,88	
05.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	328.322.000,00	326.187.561,00	(2.134.439,00)	99,35	
05.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	328.322.000,00	326.187.561,00	(2.134.439,00)	99,35	
05.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262.932.000,00	262.297.561,00	(634.439,00)	99,76	
05.1.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.910.000,00	41.530.000,00	(1.380.000,00)	96,78	
05.1.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	22.480.000,00	22.360.000,00	(120.000,00)	99,47	
05.1.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	(184.868.460,00)	92,30	
05.1.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	(184.868.460,00)	92,30	
05.1.01.01.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	(184.868.460,00)	92,30	
05.1.01.01.5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	(184.868.460,00)	92,30	
05.1.01.01.5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.400.000.000,00	2.215.131.540,00	(184.868.460,00)	92,30	
05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	542.738.000,00	540.467.248,00	(2.270.752,00)	99,58	
05.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	542.738.000,00	540.467.248,00	(2.270.752,00)	99,58	
05.1.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.038.000,00	534.767.248,00	(2.270.752,00)	99,58	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	302.588.000,00	301.823.532,00	(764.468,00)	99,75	
05.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	302.588.000,00	301.823.532,00	(764.468,00)	99,75	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.000.000,00	48.795.000,00	(205.000,00)	99,58	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.020.000,00	24.981.532,00	(38.468,00)	99,85	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.000.000,00	179.487.000,00	(513.000,00)	99,72	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.008.000,00	2.000.000,00	(8.000,00)	99,60	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	79.985.834,00	(14.166,00)	99,98	
05.1.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.985.834,00	(14.166,00)	99,98	
05.1.01.02.5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	80.000.000,00	79.985.834,00	(14.166,00)	99,98	
05.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.950.000,00	52.457.882,00	(1.492.118,00)	97,23	
05.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.950.000,00	52.457.882,00	(1.492.118,00)	97,23	
05.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.150.000,00	44.657.882,00	(1.492.118,00)	96,77	
05.1.01.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	273.520.000,00	266.880.000,00	(6.640.000,00)	97,57	
05.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	273.520.000,00	266.880.000,00	(6.640.000,00)	97,57	
05.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.520.000,00	266.880.000,00	(6.640.000,00)	97,57	
05.1.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	244.800.000,00	238.400.000,00	(6.400.000,00)	97,39	
05.1.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	244.800.000,00	238.400.000,00	(6.400.000,00)	97,39	
05.1.01.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	244.800.000,00	238.400.000,00	(6.400.000,00)	97,39	
05.1.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.720.000,00	28.480.000,00	(240.000,00)	99,16	
05.1.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.720.000,00	28.480.000,00	(240.000,00)	99,16	
05.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.720.000,00	28.480.000,00	(240.000,00)	99,16	
05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	940.837.700,00	939.493.250,00	(1.344.450,00)	99,86	
05.1.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	940.837.700,00	939.493.250,00	(1.344.450,00)	99,86	
05.1.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.837.700,00	939.493.250,00	(1.344.450,00)	99,86	
05.1.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	565.337.700,00	564.805.250,00	(532.450,00)	99,91	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.1.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	565.337.700,00	564.805.250,00	(532.450,00)	99,91	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	156.000.000,00	155.964.850,00	(35.150,00)	99,98	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.932.700,00	2.930.000,00	(2.700,00)	99,91	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	398.000.000,00	397.505.400,00	(494.600,00)	99,88	
05.1.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.850.000,00	51.850.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.778.000,00	(222.000,00)	99,11	
05.1.01.04.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	14.778.000,00	(222.000,00)	98,52	
05.1.01.04.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15.000.000,00	14.778.000,00	(222.000,00)	98,52	
05.1.01.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
05.1.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	298.650.000,00	298.060.000,00	(590.000,00)	99,80	
05.1.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.650.000,00	298.060.000,00	(590.000,00)	99,80	
05.1.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288.310.000,00	287.720.000,00	(590.000,00)	99,80	
05.1.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	100,00	
05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	173.120.000,00	173.015.000,00	(105.000,00)	99,94	
05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	
05.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	
05.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.1.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	
05.1.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	
05.1.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.280.000,00	55.255.000,00	(25.000,00)	99,95	
05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.760.000,00	74.700.000,00	(60.000,00)	99,92	
05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
05.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
05.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
05.1.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
05.1.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
05.1.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.080.000,00	43.060.000,00	(20.000,00)	99,95	
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.356.264.163,00	4.279.090.643,00	(77.173.520,00)	98,23	
06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	108.995.600,00	108.552.975,00	(442.625,00)	99,59	
06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	49.982.000,00	49.932.000,00	(50.000,00)	99,90	
06.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.982.000,00	49.932.000,00	(50.000,00)	99,90	
06.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.982.000,00	49.932.000,00	(50.000,00)	99,90	
06.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.812.000,00	4.812.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.812.000,00	4.812.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.170.000,00	45.120.000,00	(50.000,00)	99,89	
06.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.170.000,00	45.120.000,00	(50.000,00)	99,89	
06.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.170.000,00	45.120.000,00	(50.000,00)	99,89	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	59.013.600,00	58.620.975,00	(392.625,00)	99,33	
06.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.013.600,00	58.620.975,00	(392.625,00)	99,33	
06.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.013.600,00	58.620.975,00	(392.625,00)	99,33	
06.1.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	33.243.600,00	33.215.975,00	(27.625,00)	99,92	
06.1.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.243.600,00	33.215.975,00	(27.625,00)	99,92	
06.1.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	532.500,00	504.900,00	(27.600,00)	94,82	
06.1.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	239.100,00	239.100,00	0,00	100,00	
06.1.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.072.000,00	30.072.000,00	0,00	100,00	
06.1.01.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000,00	2.249.975,00	(25,00)	100,00	
06.1.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.770.000,00	25.405.000,00	(365.000,00)	98,58	
06.1.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.770.000,00	25.405.000,00	(365.000,00)	98,58	
06.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.770.000,00	25.405.000,00	(365.000,00)	98,58	
06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.056.648.713,00	1.036.916.111,00	(19.732.602,00)	98,13	
06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	226.496.030,00	225.349.500,00	(1.146.530,00)	99,49	
06.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	226.496.030,00	225.349.500,00	(1.146.530,00)	99,49	
06.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.496.030,00	225.349.500,00	(1.146.530,00)	99,49	
06.1.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	114.820.030,00	113.688.170,00	(1.131.860,00)	99,01	
06.1.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	114.820.030,00	113.688.170,00	(1.131.860,00)	99,01	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	81.132.500,00	80.005.000,00	(1.127.500,00)	98,61	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.863.860,00	22.859.500,00	(4.360,00)	99,98	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.112.500,00	5.112.500,00	0,00	100,00	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.142.500,00	2.142.500,00	0,00	100,00	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	718.670,00	718.670,00	0,00	100,00	
06.1.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.676.000,00	111.661.330,00	(14.670,00)	99,99	
06.1.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.676.000,00	111.661.330,00	(14.670,00)	99,99	
06.1.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.226.000,00	99.211.330,00	(14.670,00)	99,99	
06.1.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	830.152.683,00	811.566.611,00	(18.586.072,00)	97,76	
06.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	823.973.748,00	805.387.676,00	(18.586.072,00)	97,74	
06.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.264.773,00	612.881.676,00	(17.383.097,00)	97,24	
06.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	136.228.773,00	136.165.623,00	(63.150,00)	99,95	
06.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.228.773,00	136.165.623,00	(63.150,00)	99,95	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.080.000,00	4.068.000,00	(12.000,00)	99,71	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	46.130.800,00	46.117.400,00	(13.400,00)	99,97	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.233.324,00	14.227.324,00	(6.000,00)	99,96	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.362.500,00	2.348.750,00	(13.750,00)	99,42	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.341.900,00	15.341.900,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.667.584,00	1.667.584,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	81.665,00	81.665,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.270.000,00	28.252.000,00	(18.000,00)	99,94	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.790.000,00	10.790.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	111.484.000,00	110.754.000,00	(730.000,00)	99,35	
06.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.340.000,00	73.610.000,00	(730.000,00)	99,02	
06.1.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.150.000,00	8.700.000,00	(450.000,00)	95,08	
06.1.02.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	11.280.000,00	11.000.000,00	(280.000,00)	97,52	
06.1.02.02.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.144.000,00	37.144.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	372.552.000,00	355.962.053,00	(16.589.947,00)	95,55	
06.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	372.552.000,00	355.962.053,00	(16.589.947,00)	95,55	
06.1.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.052.000,00	348.462.053,00	(16.589.947,00)	95,46	
06.1.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.1.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	193.708.975,00	192.506.000,00	(1.202.975,00)	99,38	
06.1.02.02.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	193.708.975,00	192.506.000,00	(1.202.975,00)	99,38	
06.1.02.02.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	193.708.975,00	192.506.000,00	(1.202.975,00)	99,38	
06.1.02.02.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	193.708.975,00	192.506.000,00	(1.202.975,00)	99,38	
06.1.02.02.5.2	BELANJA MODAL	6.178.935,00	6.178.935,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.178.935,00	6.178.935,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.178.935,00	6.178.935,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.178.935,00	6.178.935,00	0,00	100,00	
06.1.02.02.5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	6.178.935,00	6.178.935,00	0,00	100,00	
06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.190.619.850,00	3.133.621.557,00	(56.998.293,00)	98,21	
06.1.03.01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.336.000,00	34.330.000,00	(6.000,00)	99,98	
06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.075.766.850,00	3.022.837.557,00	(52.929.293,00)	98,28	
06.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.075.766.850,00	1.053.580.307,00	(22.186.543,00)	97,94	
06.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.994.250,00	489.950.307,00	(19.043.943,00)	96,26	
06.1.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.580.834,00	11.580.834,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.580.834,00	11.580.834,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.614.146,00	4.614.146,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.542.088,00	5.542.088,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.024.600,00	1.024.600,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	294.795.416,00	280.335.350,00	(14.460.066,00)	95,09	
06.1.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	232.600.000,00	231.550.000,00	(1.050.000,00)	99,55	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.1.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000,00	9.150.000,00	(1.050.000,00)	89,71	
06.1.03.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	21.000.000,00	(11.000.000,00)	65,63	
06.1.03.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.000.000,00	21.000.000,00	(11.000.000,00)	65,63	
06.1.03.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.195.416,00	27.785.350,00	(2.410.066,00)	92,02	
06.1.03.02.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	17.590.000,00	(2.410.000,00)	87,95	
06.1.03.02.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.195.416,00	10.195.350,00	(66,00)	100,00	
06.1.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	202.618.000,00	198.034.123,00	(4.583.877,00)	97,74	
06.1.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	202.618.000,00	198.034.123,00	(4.583.877,00)	97,74	
06.1.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.896.000,00	195.554.123,00	(3.341.877,00)	98,32	
06.1.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.722.000,00	2.480.000,00	(1.242.000,00)	66,63	
06.1.03.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	566.772.600,00	563.630.000,00	(3.142.600,00)	99,45	
06.1.03.02.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	566.772.600,00	563.630.000,00	(3.142.600,00)	99,45	
06.1.03.02.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	566.772.600,00	563.630.000,00	(3.142.600,00)	99,45	
06.1.03.02.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	566.772.600,00	563.630.000,00	(3.142.600,00)	99,45	
06.1.03.02.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.969.257.250,00	(30.742.750,00)	98,46	
06.1.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	(28.329.000,00)	98,43	
06.1.03.02.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	(28.329.000,00)	98,43	
06.1.03.02.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	(28.329.000,00)	98,43	
06.1.03.02.5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	(28.329.000,00)	98,43	
06.1.03.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.586.250,00	(2.413.750,00)	98,79	
06.1.03.02.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	197.586.250,00	(2.413.750,00)	98,79	
06.1.03.02.5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	197.586.250,00	(2.413.750,00)	98,79	
06.1.03.02.5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	197.586.250,00	(2.413.750,00)	98,79	
06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80.517.000,00	76.454.000,00	(4.063.000,00)	94,95	
06.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.517.000,00	76.454.000,00	(4.063.000,00)	94,95	
06.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.517.000,00	76.454.000,00	(4.063.000,00)	94,95	
06.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	33.063.000,00	33.063.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.063.000,00	33.063.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.732.000,00	26.732.000,00	0,00	100,00	
06.1.03.03.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.1.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.900.000,00	16.000.000,00	(2.900.000,00)	84,66	
06.1.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	16.000.000,00	(2.900.000,00)	84,66	
06.1.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.900.000,00	4.600.000,00	(300.000,00)	93,88	
06.1.03.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.000.000,00	11.400.000,00	(2.600.000,00)	81,43	
06.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.554.000,00	27.391.000,00	(1.163.000,00)	95,93	
06.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.554.000,00	27.391.000,00	(1.163.000,00)	95,93	
06.1.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.763.000,00	20.693.000,00	(70.000,00)	99,66	
06.1.03.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.791.000,00	6.698.000,00	(1.093.000,00)	85,97	
	SURPLUS / DEFISIT	(83.620.110.938,00)	(76.360.654.403,00)	7.259.456.535,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(83.620.110.938,00)	(76.360.654.403,00)	7.259.456.535,00	0	

